



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH telah divalidasi
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI XI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2022 – 2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : Ke – 14
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 12 September 2022
Waktu : 13.00 s.d. 16.19 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat : Drs. Fathan (Wk. Ketua Komisi XI/ F – PKB)
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos. (Kabag Setkom XI)
Acara : Pembahasan *Right Issue* PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI**

35 dari 54 orang Anggota Komisi XI DPR RI dengan rincian:

PIMPINAN

- 2 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan :
1. Dolfie O. F. P. (Wk Ketua / F – PDIP)
2. Drs. Fathan (Wk Ketua / F – PKB)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN**

- 8 orang dari 11 orang Anggota :
1. Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM
2. Ir. Eriko Sotadurga B. P. S.
3. Masinton Pasaribu, SH
4. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
5. Indah Kurnia
6. Dr. Sihar P. H. Sitorus, BSBA, MBA
7. I. G. A. Rai Wirajaya, SE., MM

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

- 4 orang Anggota dari 7 orang Anggota :

1. H. Mukhamad Misbakhun, SE., M.H
2. Puteri Anetta Komandin, B.Com.
3. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si
4. Melchias Markus Mekeng

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

7 orang Anggota dari 7 orang Anggota :

1. Heri Gunawan, SE
2. H. Gus Irawan Pasaribu, SE,AK,MM,CA
3. Susi Marleny Bachsin, SE., MM
4. Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si
5. DR. H. Jefry Romdonny, SE., S.Sos., M.Si, MM
6. Wihadi Wiyanto, SH., MH.
7. Bahtra

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota :

1. Fauzi Amro, M.Si
2. Satori, S.Pdl., MM
3. H. Charles Meikyansah

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

4 orang Anggota dari 3 orang Anggota :

1. H. Abdul Wahid, S.Pd.I
2. Bertu Merlas, ST
3. H. Alamuddin Dimiyati Rois
4. Farida Hidayati, SH., M.Kn.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota :

1. Hj. Vera Febyanthy, M.Si
2. Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LLM
3. Hj. Siti Mufattahah, P.Si., M.B.A.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota :

1. H. Hidayatullah, SE
2. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si
3. H. Ecky Awal Mucharam

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

1 orang Anggota dari 4 orang Anggota :

1. Primus Yustisio, SE., M.AP.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota :

1. Dra. Hj. Wartiah, M.Pd.

B. UNDANGAN :

1. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI (Rionald Silaban)
2. Dirut PT Waskita Karya (Destiawan S.)

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT/F- PKB (Drs. FATHAN) :

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu.
Nammo Buddhaya.
Salam Kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang terhormat Saudara Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan beserta jajarannya,
Yang terhormati Direktur Utama PT Waskita Raya beserta jajarannya, serta hadirin yang berbahagia.

Menurut laporan dari Sekretaris Komisi XI DPR RI, Rapat Kerja pada siang hari ini dihadiri oleh 20 orang dari 8 fraksi. Dengan demikian kourum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 279 dan 281 Peraturan DPR RI telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, izinkan kami membuka rapat dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Mengawali rapat pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wata 'ala* dengan sehat wal 'alfiat bisa menghadiri Rapat Kerja pada siang hari ini.

Agenda rapat pada hari ini adalah pendalaman rencana proses Privatisasi dan Penambahan Penyertaan Modal Negara melalui mekanisme *right issue* pada PT Waskita Karya. Perlu kami sampaikan bahwa Komisi XI DPR RI telah menerima surat dari Menteri Keuangan Nomor 141 Tanggal 5 Juli 2022 mengenai permohonan pendalaman dengan Komisi XI terkait Rencana Program Tahunan Privatisasi Persero Tahun 2022.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan pada 29 Agustus disampaikan bahwa akan dilakukan melalui mekanisme *right issue*, di mana Pemerintah akan mengambil haknya melalui PMN senilai 3 triliun. Tujuan dari privatisasi adalah untuk memperkuat struktur permodalan perseroan termasuk dalam rangka menyelesaikan pekerjaan Proyek-proyek Jalan Tol yang dimiliki oleh Waskita Karya. Adapun manfaat yang diharapkan dari privatisasi tersebut untuk pemerataan pembangunan wilayah luas tol penerima PMN dan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah sekitar jalan tol yang

akan mendongkrak perekonomian serta terlaksananya program Pemerintah untuk integrasi Tol Jawa dan integrasi ruas Tol Sumatera. Dalam rangka mendahului Surat Menteri Keuangan serta untuk memenuhi mekanisme *check and balance* terhadap Pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi Persero Tahun 2022 pada hari ini Komisi XI ingin mendengarkan penjelasan dari Dirjen Kekayaan Negara, dan dari Pak Direktur Utama terhadap rencana *right issue* tersebut.

Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Dirjen dan Pak Dirut untuk menyampaikan Pemaparannya, silakan.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI (RIONALD SILABAN) :

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi XI yang kami hormati.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa 'alaikum salam.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Sebagaimana yang telah dijadwalkan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan. Hari ini kita akan membahas mengenai pendalaman atas rencana privatisasi PT Waskita Karya dalam rangka penambahan modalnya melalui mekanisme *right issue*. Dapat kami sampaikan bahwa kondisi terkini dari Waskita Karya adalah Waskita terus dan sedang menjalankan program penyehatan termasuk di dalam rencana penyertaan tersebut adalah penyertaan modal negara Tahun 2021 sebesar 7,9 triliun dan penyertaan modal negara Tahun 2022 sebesar 3 triliun dengan skema *right issue*.

Dapat disampaikan bahwa terjadi perbaikan kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dengan penurunan kerugian di Tahun 2021 menjadi sebesar 1,8 triliun dari semula rugi sebesar 9,3 triliun di Tahun 2020 dan per kuartal 2022 Waskita berhasil membukukan laba sebesar 293 miliar. Adapun rincian penggunaan dana PMN dimaksudkan untuk menyelesaikan proyek Tol Kayuagung Palembang-Betung sekitar 2 triliun dan kemudian Tol Ciawi-Sukabumi sekitar hampir 1 triliun. Direncanakan privatisasi nya akan dilakukan melalui mekanisme *right issue* dan diharapkan *right issue* tersebut dapat dilakukan pada Bulan November 2022.

Sebagai salah satu dari penyehatan, memang PMN ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dari Waskita dan juga diharapkan ini dapat memperlancar proses restrukturisasi kredit di Badan Usaha Jalan Tol karena adanya dukungan dana dari *shareholder*. Pada kesempatan ini perkenankan untuk Direktur Waskita melakukan penjelasan detail terkait dengan rencana

right issue yang akan mereka lakukan dan juga perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Waskita, terima kasih.

Silakan.

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA (DESTIAWAN SOEWARDJONO) :

Terima kasih Pak Dirjen.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang.

Salam Sejahtera buat kita semua.

Om Swastiastu.

Nammo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Yang sangat kami hormati Pimpinan Komisi XI DPR RI,
Yang terhormat para Anggota Komisi XI yang hadir pada siang hari ini dan juga dari Kementerian Keuangan Pak Dirjen Kekayaan Negara.

Kami akan sedikit menjelaskan mengenai rencana privatisasi atau *right issue* Waskita Karya akibat adanya penambahan modal negara Tahun 2020, penyertaan modal negara Tahun 2022 sebesar 3 triliun.

Lanjut sebagai *summary* dari apa yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini, jadi Waskita Karya adalah BUMN yang kepemilikannya saat ini adalah 75% oleh Pemerintah dan 25% oleh publik. Tujuan dan manfaat PMN 2022 adalah Waskita dalam fase restrukturisasi dan dibutuhkan penguatan permodalan. Waskita saat ini dalam proses penyehatan dengan 8 *stream* strategi penyehatan, di mana salah satu strateginya adalah PMN dan akibat dari PMN karena Waskita ini perusahaan publik maka arus dilakukan *right issue*. PMN Tahun 2022 sebesar 3 triliun akan dialokasikan untuk penyelesaian Tol Kapal Betung dan Tol Ciawi Sukabumi. Latar belakang pelaksanaan *right issue* dan rencana penggunaan, guna menjaga komposisi struktur kepemilikan saham saat ini, maka Waskita akan melakukan *right issue* dengan target perolehan dana dari publik sebesar Rp980 miliar. Dana *right issue* dari publik akan digunakan Waskita untuk modal kerja proyek infrastruktur strategis yang sedang dikerjakan oleh Waskita.

Metode *right issue*, sesuai POJK 32 Tahun 2015 *right issue* dilakukan dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, *right issue* dilakukan dalam bentuk tunai. Metode penentuan harga pelaksanaan direncanakan menggunakan metode VWAP90D atau *class price*. Jadwal pelaksanaan PMN dan *right issue* ini saat ini sedang menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah PMN Tahun 2022 yang diterbitkan akan terbit di Bulan September 2022. Pernyataan efektif OJK direncanakan pada Oktober 2022 dan periode perdagangan HMETD pada November 2022.

Lini bisnis Waskita masih tetap sama yaitu *main business* adalah konstruksi, kemudian *backbone*-nya adalah investasi dalam Toll Road, Waskita Realty dan Waskita Infrastruktur, kemudian untuk *supporting* konstruksinya Waskita mempunyai Waskita Beton Precast dan Waskita Infrastruktur yang bisnisnya adalah fabrikasi baja. Portofolio Tol Waskita, di awal PT Waskita Karya melalui kepemilikan langsung maupun melalui anak usaha PT Waskita Toll Road telah berhasil memakan investasi jalan tol serta telah turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur jalan tol untuk meningkatkan konektivitas. Portofolio Tol Waskita dari 2014 sampai 2022 adalah 20 jalan tol dengan porsi investasi sebesar 124 triliun. Ini hanya porsi Waskita saja dari total investasi sebesar 248 triliun dan panjang total dari porsi Waskita kurang lebih 1.300 kilometer dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa.

Saat ini Tol Waskita tinggal 12 ruas konsesi dengan nilai investasi 84 triliun dan total panjang porsi Waskita tinggal 358 kilometer yang saat ini 154 kilometer telah beroperasi penuh atau sebagian dan tahap konstruksi masih 153 kilometer yang penyelesaiannya ini menggunakan Dana PMN, kemudian 51 kilometer adalah prakonstruksi porsi Waskita. Ruas yang ada yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan khususnya Kapal Betung, kemudian di Jabotabek dan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masih harus dikerjakan.

Kemudian 100 *process strategic partnership* jalan tol, jadi ada 20 tadi adalah ruas-ruas yang tadi saya sampaikan di depan dan sebagian dilaksanakan *process strategic partnership*-nya yaitu PT Jasa Marga Solo Ngawi pada Tahun 2019, Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri juga 2019, pada Tahun 2021 Jasa Marga Kualanamu Tol, Jasa Marga Semarang Batang, Jasa Marga Cinere Serpong Jaya dan Jasa Marga Tanjung Priok Toll Way. Tahun 22 ini telah selesai dilakukan setelah *process strategic partnership* yaitu Cimanggis Cibitung Toll Ways, kemudian PT Semesta Marga Raya yaitu ruas Kanci-Pejagan dan PT Pejagan Pemalang Toll Road yang telah dilakukan pada minggu yang lalu dengan INA. Selanjutnya untuk sisanya adalah kami harus menyelesaikan konstruksinya dan beberapa ruas dalam proses penawaran kepada investor yaitu Pemalang-Batang-Pekalongan, Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Depok-Antasari yang kami targetkan Tahun 2022 ini Pemalang-Batang-Pekalongan dan tahun depan Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Depok-Antasari. *Nah* selanjutnya Tahun 2024 Pasuruan-Probolinggo, 2025 Bekasi Cawang-Kampung Melayu dan Karian-Legundi-Bunder-Manyar.

Evaluasi kinerja operasional Tahun 2017 sampai Tahun 2021. Pada Tahun 2019 terdapat perlambatan perekonomian global yang mempengaruhi turunnya perdagangan dan harga komoditas dunia, *Nah* penurunan ini disebabkan oleh sentimen negatif antara Amerika dan China sehingga ini mempengaruhi dalam perolehan dan produksi Waskita. Tahun 2020 kondisi Waskita yang mengalami krisis akibat dampak Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi kinerja dan likuiditas Waskita. Progres menurun karena aktivitas, kemudian tertundanya *strategic partnership* jalan tol karena pembatasan aktivitas, kemudian peningkatan piutang selama pandemi karena menyebabkan banyak piutang tertahan dan berdampak pada penurunan kolektabilitas. Kemudian pada ruas-ruas yang telah beroperasi terjadinya penurunan volume lalu lintas, sehingga pendapatan menjadi menurun. Kondisi

tersebut berdampak pada kemampuan Waskita dalam memenuhi kewajiban finansialnya, proyek serta mengalami rugi bersih yang cukup tinggi pada Tahun 2020, ini dapat terlihat di dalam tabel dan diagram.

Tahun 2021 kinerja Waskita perlahan mulai membaik, salah satunya akibat dari adanya dukungan Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara Tahun 2021, serta dana *right issue* dari publik yang pelaksanaannya di awal Tahun 2022. Evaluasi kinerja keuangan terkait dengan rasio-rasio yang ada saat ini, Waskita mengalami perbaikan yang cukup baik dengan adanya PMN yang kami terima dan *right issue* pada Tahun 2021. *Rating* kredit Waskita mengalami penurunan dan pada Juli 2020, kemudian sampai Desember 2020, 2021 menjadi *triple b*, kemudian peningkatan beban keuangan akibat bunga operasional jalan tol dan penundaan penerimaan termin untuk pelunasan pinjaman bank yang ini menyebabkan beban keuangan semakin meningkat dari 2017 ke 2021 dari 1,9 menjadi 4,8 triliun.

Kemudian indikator keuangan Waskita dapat kami sampaikan di sini mulai dari 2017-2022 terkait dengan baik pendapatan yang mengalami penurunan, kemudian laba tapi di Periode Semester I 2022 Waskita telah membukukan laba bersih sebesar 293 dari kerugian tahun lalu 2021 sebesar 1,8 triliun. Laporan posisi keuangan konsolidasian ini dapat juga dilihat dalam tabel ini di mana total liabilitas dan ekuitas mengalami dari 2017 mengalami peningkatan, tapi kemudian mengalami penurunan dan di kuartal Triwulan ke II 2022 total liabilitas dan ekuitas tinggal Rp97 triliun 143 miliar. Rasio-rasio juga mengalami perubahan termasuk juga dengan *debt equity ratio* juga mengalami penurunan di mana Tahun 2021 sebesar 5,7 saat ini Semester I atau Triwulan ke II sebesar 3,87.

Laporan arus kas konsolidasian juga dapat dilihat dalam tabel. Kemudian terkait dengan *right issue* Tahun 2022, jadi *right issue* ini terjadi akibat adanya penyertaan modal negara Tahun 2021 dan 2022. Jadi Waskita dalam rangka untuk penyehatan mengimplementasikan 8 program penyehatan keuangan Waskita. Salah satu dari 8 program penyehatan ini adalah penyertaan modal negara dan *right issue*. Pada tahun 2021 dengan dilaksanakannya PMN sebesar 7,9 *right issue* yang diperoleh sebesar 1,54 triliun. PMN Tahun 2022 RPP PMN saat ini sedang diproses oleh Pemerintah dan proses kepada masyarakat dan diharapkan seperti yang tadi kami sampaikan.

Kemudian alokasi dana PMN dan rencana *right issue* Tahun 2022 sudah kami sebutkan bahwa PMN sebesar 3 triliun ini akan dialokasikan untuk penyelesaian penambahan penyelesaian ruas Kayuagung-Palembang-Betung sebesar Rp2 triliun 4 miliar, kemudian untuk Ciawi-Sukabumi sebesar Rp996 miliar. Rencana *right issue*, jadi komposisi sebelum *right issue* Tahun 2021, komposisi awal Saham Waskita Pemerintah sebesar 66,04%, kemudian publik 33,96. Dengan adanya *right* penambahan modal, penyertaan modal negara sebesar 7,9 dan publik *right issue* sebesar 1,2 triliun, komposisi saat ini menjadi 75,35% pemerintahan dan publik 24,65%.

Rencana *right issue* Tahun 2022 dengan PMN sebesar 3 triliun bila komposisinya sama, maka *right issue* yang diharapkan sebesar 0,9 triliun dengan komposisi bila ini tercapai maka struktur kepemilikan akan menjadi 75,35% Pemerintah dan Publik 24,65%. Rencana penggunaan dana hasil *right issue* Tahun 2022 akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja proyek infrastruktur strategis. Apabila target *right issue* porsi publik tidak tercapai maka Waskita harus mencari alternatif lain agar proyek-proyek strategis tersebut dapat kami selesaikan. Kemudian ini adalah metode *right issue* sudah kami sampaikan, kemudian ini *timetable right issue* Tahun 2022 dan yang terpenting dalam proses *right issue*, ini adalah penerbitan PP PMN yang kami harapkan Tanggal 16 September 2022, kemudian RUPSLB yang akan kami laksanakan Tanggal 26 September 2022, pernyataan efektif OJK 26 Oktober 2022 dan penerimaan dana PMN dari Pemerintah kami harapkan Tanggal 16 November 2022.

Kemudian manfaat penambahan PMN dan *right issue* dapat ditunjukkan pada kinerja operasional yang kami harapkan dalam 3 tahun ke depan akan terjadi peningkatan baik pendapatan dan kemudian juga laba bersih. Kemudian rasio-rasio keuangan juga memenuhi kriteria, iya berada di bawah *governance*, yang target kami di Tahun 2025 DER sebesar 1,5 kali, kemudian dari *current ratio* itu menjadi 1,4.

Sebagai Kesimpulan, manfaat penambahan PMN dan *right issue*. Yang pertama adalah adanya aliran dana dari PMN dan *right issue* dapat dijadikan sebagai sumber modal kerja bagi perusahaan untuk dapat menyelesaikan Proyek Jalan Tol dan Proyek Infrastruktur lainnya secara tepat waktu. Kemudian penyelesaian ruas tol yang sesuai waktu sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi karena meningkatkan konektivitas antar wilayah baik itu jaringan Trans Jawa dan Trans Sumatera, kemudian juga memperbaiki alur logistik barang dan jasa.

Ketiga, implementasi program penyehatan keuangan perusahaan melalui 8 stream penyehatan keuangan telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Diharapkan kedepan Waskita dapat memenuhi rencana jangka panjang dan dapat keluar dari masa restrukturisasi. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi terkait dua negara terkait dengan deviden, pajak pusat dan pajak daerah yang secara total sejak Tahun 2010 sampai 2021 kurang lebih 35,6 triliun.

Demikian Pimpinan yang dapat kami sampaikan, terima kasih mohon masukan dan arahan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kembalikan Pak Dirjen.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Terima kasih Pak Dirut, dengan demikian kami kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih Pak Dirjen, Pak Dirut yang telah menyampaikan pemaparannya. Hadir juga di sini Direktur Keuangan ya ? Pak Wiwiek Suprihatno, Pak Bambang Riyanto Direktur Operation II, Pak Warjo sama Direktur Operation II juga.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Tadi Pak Dirjen dan Pak Dirut telah menyampaikan pemaparannya dan kita masuk pendalaman, silakan teman-teman fraksi untuk memberikan tanggapan, respons.

Silakan PDI Perjuangan Pak Andreas silakan.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI,
Pak Dirjen Kekayaan Negara beserta jajaran serta Direksi dari Waskita Karya.

Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Dirjen, karena mitra kita adalah Dirjen Kekayaan Negara, sehingga dalam privatisasi ini kita berhubungan dengan Pak Dirjen, yang lainnya itu sebagai pendamping kira-kira demikian. Karena evaluasi tentunya di lakukan oleh Dirjen Kekayaan Negara sebagai pemegang saham daripada BUMN ini ya ?

Saya ingin menyampaikan pertama adalah saya ingin sebetulnya kajian dari tempatnya Pak Rio tentang rencana *right issue* ini, jadi bukan hanya sekedar pemaparan rencana, tapi kajiannya. Kita memang telah melakukan rapat Tanggal 24 November 2021 di mana memang kita sudah menyetujui tentang PMN ini, tapi di situ ada kalau saya lihat ada satu catatan dari rapat itu yaitu agar disampaikan kepada Komisi XI *roadmap* dari restrukturisasi bisnis dari *refocusing* bisnis dalam rangka meningkatkan efisiensi. Ini yang saya cari-cari belum kami terima, jadi ini mohon dijelaskan.

Kemudian kedua setelah rapat itu karena ini menyangkut *right issue* menyangkut perusahaan terbuka, maka sangat penting adanya keterbukaan informasi. *Nah* pada Tanggal 27, ini kalau *right issue* ini termasuk *sub sequent event*. Pada Tanggal 27 Juli Tahun 2022, Kejaksaan Agung menyampaikan terjadinya potensi kerugian negara sebesar 2,5 triliun dari PT Waskita Beton Precast Tbk yang merupakan anak perusahaan dari PT Waskita Karya yang terjadi pada Tahun 2016-2020, dengan modus pengadaan barang fiktif dengan meminjam beberapa bendera, pengadaan barang tidak dapat dimanfaatkan dan beberapa pengadaan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Saya mencoba mencari apakah sudah ada keterbukaan informasi publik ? saya lagi cari-cari tapi belum mendapatkan, kami mohon penjelasan karena ini menyangkut *sub sequent kan* yang penting. 2,5 triliun adalah

merupakan angka yang sangat material, apalagi *right issue*-nya *kan* sekarang 3 triliun artinya kerugian tersebut selama ini dibukukan di mana *ya* ? memang ini potensi tapi ada *loses*, *loses*-nya itu ada di mana ? disampaikan di situ 2016-2020 dan ini bagi kami juga menarik, laporan keuangannya ini munculnya di mana *nih* Pak Rio *iya* ? Bapak *kan* saya tanya, Bapak sudah melakukan evaluasi ini *enggak* ? saya dalam hal ini sebagai katakanlah anggap saja saya sebagai salah satu pemegang saham minoritas dari Waskita Karya, saya menanyakan ini, *iya kan* ? di mana ininya ? karena ini menyangkut keterbukaan informasi. Salah satu 8 *stream* itu adalah mengenai GCG dan manajemen risiko dan sebagai perusahaan publik seharusnya, ini harus ada keterbukaan informasi publik, karena kenapa ? Jaksa Agung, Kejaksaan sudah menyampaikan secara terbuka di publik. Jadi kami setelah rapat 24 November itu, ini 27 Juli ada perkembangan demikian. Jadi kami mohon dari kajiannya tempatnya Pak Rio, sejauh mana *nih* apakah hal ini sudah dilakukan kajiannya ?

Kemudian yang kedua mengenai rencana *right issue* nya sendiri, kalau kita lihat dari tahun lalu *historical*-nya 2021 sebelum Tahun 2021, porsi Pemerintah adalah 66,09%, Publik 33% dan ketika dilakukan *right issue*, *proceed* yang diharapkan dari publik dari 9,4 triliun itu adalah 4 triliun, tapi yang diserap oleh publik. Artinya yang laku cuma 1,5 triliun sehingga menyebabkan porsi Pemerintah bertambah padahal ini, Pak Rio sekali lagi yang kita tanyakan *roadmap*, ini *kan* tidak sesuai dengan tujuan awal dari *go public*-nya Waskita Karya ini. *Nah*, berangkat dari situ pada saat itu saja daya serap publiknya dengan berbagai tentu berarti artinya apa ? *Right issue* *enggak* menarik *dong*, kalau *right issue* nya menarik pasti *prosheet*nya diambil, *lah* bagaimana dengan Tahun 2022 yang dari 3 triliun ini adalah 900 miliar.

Pertanyaannya, tadi disampaikan kalau *right issue* tidak tercapai maka opsi yang dilakukan akan dilakukan opsi lain. *Loh* ini berarti opsi lainnya itu apa ? artinya ini menyangkut Poin 1 tadi di dalam 8 *stream* tadi. *Kan right issue* ini bagian dari restrukturisasi kredit, *lah* kalau ini *enggak* dicapai apa ? mau melakukan pinjaman ? atau bagaimana ? berarti bagaimana dengan program restrukturisasinya sendiri ? *kan* balik ke situ Pak, jadi saya terus terang saja.

Ini, ini saya lagi mikir *nih*, saya berputar ini benang ruwetnya nanti jadi *kayak* bagaimana *nih* ? *iya* walaupun kita sangat, sangat mendukung pada saat Bulan November kemarin tetapi sebagai bagian dari akuntabilitas publik, ini perlu disampaikan, perlu jelas sekali *nih* dan terutama ini kajian dari tempatnya Pak Rio yang saat ini sebagai mitra dari pada kami di Komisi XI menyampaikan rencana *right issue* ini.

Terus kemudian yang keempat, saya kira tadi disampaikan berkali-kali oleh Pak Dirut perbaikan operasional ini karena dia PMN dan Pak Rio, saya minta tolong perhatian ini, penyakitnya BUMN di sini *nih* masuk ke anak perusahaan, ke cucu anak perusahaan yang *bikin* penyakit dan itu bisa kita lihat restrukturisasi utang bank anak usaha, anak usahanya total 28,66 triliun, ini penyakitnya di sini. Di anak, kadang-kadang cucunya *nih*. *Lah* bagaimana, sejauh mana *nih* pengendalian daripada tempatnya Pak Rio untuk hal ini ? dan

sejauh mana ini Pak Rio bahwa betul-betul PMN ini digunakan tidak untuk menutup kerugian karena salah kelola, ini yang paling penting.

Dan yang terakhir yang Nomor 5, memang kita tahu problem karya-karya ini waktu itu 2 tahun yang lalu kita sudah identifikasi dan ini sebetulnya baru bisa akan terselesaikan secara komprehensif waktu itu dengan adanya intervensi atau masuknya Lembaga Pembiayaan Investasi Indonesia. Tadi saya dengar, tapi progresnya *kok* lambat sekali ? mungkin mohon penjelasan bahwa apa yang menjadi hambatan ini ? karena menurut saya, ini *enggak* bisa sendirian ini, tetapi yang penting juga kita minta kejelasan *nih*, pertanggung, kejelasan bagaimana supaya kalau ini *clear, kan* Bapak mau minta dari publik *nih*, iya minta dari publik *nih*. *Nah*, publik kalau *enggak* jelas ini *ya* sebetulnya ini mau *right issue* 3 triliun *gampangannya*, tapi *kok* kerugiannya sendiri 2,5 triliun ini bagaimana *nih* ceritanya ? saya kira ini perlu dijelaskan dengan baik.

Sekian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik Pak Dirjen, luar biasa Pak Andreas. Sahamnya di mana-mana kalau Pak Andreas ini.

Baik sekarang Fraksi Golkar, silakan Pak Misbakhun.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :

Terima kasih.

Pak Fathan yang memimpin rapat yang saya hormati, beserta Pimpinan Pak Dolfie, seluruh Anggota Komisi XI yang saya hormati, Pak Dirjen Kekayaan Negara yang saya hormati beserta jajaran, serta Direksi Waskita Karya, ada Pak Dirut beserta jajaran yang saya hormati.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Pertanyaan saya langsung Pak soal, karena Pak Andreas tadi sudah menanyakan hal-hal yang sangat fundamental dan saya *enggak* ingin mengulang. Saya ingin mengenai, mengenai Laporan Keuangan Pak. Di sini Bapak memberikan halaman ini, ini saya *nggak* tahu ini halaman berapa *nih*, 4 Halaman 4 ya ? masih semuanya 4 ini karena ini *kan*, 13 ya ? *nah* sebelum *nah*. Saya ingin melihat bahwa disitu disajikan mengenai 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Di situ ditampilkan *profile* pendapatan usaha, *kan* yang kita ketahui bahwa Waskita Karya itu *kan* *core* kompetensi itu adalah Bidang Konstruksi pertamanya, sebagai jasa konstruksi.

Kemudian setelah Pemerintah menggenjot pengerjaan infrastruktur, maka Bapak memegang portofolio kepemilikan infrastruktur yang sebelumnya Bapak disuruh mendapatkan tugas mengerjakan tetapi sekarang mendapatkan tugas juga memiliki proyek yang Bapak kerjakan itu sehingga mengalami

kebingungan kalau menurut saya. Waskita Karya ini sekarang mengalami proses kebingungan, *nah* di situ kelihatan sekali bahwa justru *core* usaha Bapak, kalau 2017 masih 42 triliun 42, kemudian 2018 dan proporsi makin lama makin menurun 2021. Apa yang menjadi pekerjaan konstruksinya ? sementara *shifting* Bapak yaitu memegang portofolio dan memiliki nilai jalan tol kemudian pendapatannya tidak memberikan nilai yang bisa menambah, menggantikan apa yang menjadi bidang usaha Bapak yaitu di konstruksi, sehingga sangat terstruktur, masif dan sangat signifikan jumlah pendapatan Bapak menurun karena apa ? semua daya upaya keuangan yang Bapak miliki digunakan untuk apa ? memperkuat portofolio kepemilikan itu. *nah* ini yang terjadi Pak.

Dalam situasi yang seperti ini, kemudian saya melihat ada sebuah situasi yang sangat sulit dari situ sebagai perusahaan Tbk karena penugasan ini. Saya tidak melihat dan ini saya setuju yang disampaikan oleh Pak Andreas, ini adalah *policy* Pemerintah, Waskita ini jadi korban, Waskita ini jadi korban. *nah* Waskita ini jadi korban *policy*-nya Pemerintah. Saya akhirnya saya bertanya begini *nih* Pak, kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekarang kita tanyakan, apakah konstruksi ini adalah cabang produksi yang penting bagi negara ? sehingga setiap tahun kita ini disibukkan ketika mengurus APBN, itu berbicara tentang bagaimana menjaga *sustainability*, kredibilitas negara sebagai pemegang saham dan harus mengeluarkan uang yang kita pungut dari pemungut pajak yang merupakan kompetitor Bapak yang bidang usahanya konstruksi.

Kalau swasta itu Pak yang mengerjakan konstruksi dengan Bapak, dia tidak bisa teriak kepada negara untuk mengambil uang pajak yang sudah mereka bayarkan, sementara Bapak ketika menghadapi kesulitan karena pemegang sahamnya adalah negara, mengambil uang dari pemilik pajak, pembayar pajak. Kalau saya jadi pembayar pajaknya, saya *nggak* mau bayar Pak karena apa ? negara bersaing dengan saya untuk menghabisi bisnis saya. Kalau berbicara seperti ini *enggak* mungkin swasta bisa menang dari negara, karena apa ? afirmasi kebijakan, afirmasi anggaran dan polisional semuanya akan kepada BUMN, sementara kita mengatakan bahwa negara kita tidak boleh etatis, peran negara yang terlalu besar.

Nah ini kembali lagi kepada Pak Rio, apakah perlu kita mempunyai kemudian BUMN di sektor ini Pak ? kalau kita bicara *right issue* sekali hari ini, kenapa kita *enggak* lepaskan saja mereka ? serahkan aja, apa pentingnya kita memiliki usaha konstruksi, kalau isinya tiap tahun adalah menggerogoti keuangan negara dan kemampuan ruang fiskal kita makin menyempit ? apakah kita perlu kemudian yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Andreas, Mereka mempunyai jalan tol, produk beton pracetak, kemudian properti dan hotel infrastruktur ? apa ini Pak negara, cara kita mengelola negara ini dengan cara apa ? apakah hotel, beton pracetak itu mengangkat hajat hidup orang banyak ? apakah ini menyangkut hajat hidup orang banyak ? Pak Rio yang punya *policy*, terus kita tiap tahun disuruh rapat seperti ini, ketika mereka mengalami gangguan terhadap kesinambungan keuangan mereka. Kita buka

sekarang *policy* kita mengenai BUMN ini. *Lah* ini Pak yang ingin saya sampaikan.

Kemudian apalagi, kemudian Hak Penguasaan Efek. Kalau sudah menghadapi situasi kesinambungan keuangan yang tidak berlanjut, *going concern*-nya menghadapi krisis permasalahan seperti ini Pak, saya yakin hak penguasaan efek terlebih dahulu *enggak* akan ada yang mau mengambil Pak, *enggak* ada yang mau ambil Pak. *Right issue* apapun, pasti yang *put option* pertama pasti Pemerintah lagi, pasti ujung-ujungnya adalah BMN, berikutnya apa ? meningkatkan kapasitas *debt equity to ratio*, DER-nya supaya bisa hutang lagi. *Lah* apakah begini cara kita menangani BUMN ini ? begini cara kita mengelola ? seakan-akan kita tidak mempunyai kemampuan bagaimana melakukan *re-engineering* terhadap laporan keuangan. Kalau permasalahannya sendiri tidak kita selesaikan, permasalahan utamanya. Contoh Pak, Bapak mau dilepaskan kepada INA, beberapa ruas saya baca dan saya tidak melihat dipaparan ini, itu ada sebagian ya. Saya tidak melihat INA ini sudah melalui proses seperti apa ? Pembayaran seperti apa ? BUMN yang satu kepada BUMN yang lain, itu *solve* ? *enggak* ? apakah itu kemudian Bapak menjadi lebih *fresh* mendapatkan uang *cash* ? *enggak* juga, itu. *Lah* apakah begini cara kita menyelesaikan itu ? berujung dari satu penyelesaian yang tidak tuntas di sini kita selesaikan ke masalah yang lain tidak tuntas juga itu, karena apa ? semuanya *by engineering*, melalui rekayasa yang tidak tuntas penyelesaiannya.

Lah ini saya pesan kepada Pak Rio, saya terus terang Pak, cara penyelesaian seperti ini tidak memuaskan saya sebagai Anggota Komisi XI dan tidak menunjukkan tingkat kredibilitas Pemerintah cara menyelesaikan secara fundamental terhadap permasalahan BUMN ini, konstruksi ini karena apa ? saya tahu bahwa infrastruktur itu penting, konektivitas masyarakat itu sangat penting meningkatkan derajat tingkat kemampuan ekonomi kita, tapi kalau cara kita mengerjakannya dengan cara seperti ini, ini kita sedang menyimpan sebuah permasalahan yang serius di balik karpet kita. Kita sedang menyimpan sebuah permasalahan yang sangat fundamental yang kita tidak mampu mengurai secara fundamental juga.

Itu saja pandangan saya Pak, terima kasih.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih.

Pak Dirjen.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat.

Saya mohon izin perkenannya untuk kami sebentar ke Banggar Pak dalam rangka pembiayaan pembicaraan, pembiayaan pembicaraan investasi. Mohon perkenan Pak.

KETUA RAPAT :

Oke.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Baik.

KETUA RAPAT :

Silakan.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Dirjen, ada Pak Dirut.

Nanti balik lagi Pak Dirjen.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Pimpinan.

Ini lebih baik bagaimana *nih sorry* ? karena *kan* mitra kita Pak Dirjen, *diskros* dulu kalau *enggak*.

F – P. NASDEM (FAUZI. H AMRO MSI.) :

Kalau, izin Pak, interupsi Pak Fathan. Interupsi Pak, boleh ?

KETUA RAPAT :

Kan ada Waskitanya Pak Andreas.

F – P. NASDEM (FAUZI. H AMRO MSI.) :

Kan mitra kita dengan Pak ini, Pak, dengan Pak Dirjen. Kalau Waskita di sini sendiri bukan mitra kita Pak.

Hanya usulan, kalau Pak Dirjennya ke Banggar, kita *skors* dulu.

KETUA RAPAT :

Kalau Pak Dolife *sih* lanjut *ya* ?

WAKIL KETUA KOMISI XI/ F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P) :

Usul lanjut saja. Usul, usul Pak Ketua Pimpinan Rapat.

Mungkin bisa lanjut saja, tapi nanti waktu mengambil keputusan Pak Dirjen harus ada di sini.

KETUA RAPAT :

Iya bagaimana ?

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Itu dan kami juga akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan nanti Bapak.

WAKIL KETUA KOMISI XI/ F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P) :

Iya, ini hanya untuk biar waktu kita efektif saja *sih*. Kalau kita *skors* di sana,

KETUA RAPAT :

Lama sampai magrib *ya* ? Iya tunda lagi.

WAKIL KETUA KOMISI XI/ F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P) :

Kita izinkan Pak Rio 30 menit paling lama Pak, jadi kalau *enggak*, iya Pak Rio *ya* ? Iya, jadi kita bisa ini,

KETUA RAPAT :

Jam 16.00 WIB kita ambil Kesimpulan.

Baik silakan Fraksi Gerindra. Pak Bahtra, Pak Bahtra atau Pak Jefry ? Pak Jefry ? karena pesan Kapoksi, Pak Bahtra.

F – P. GERINDRA (BAHTRA) :

Perintahnya daripada Pak Kapoksi, terpaksa saya yang harus menyampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan ke Pak Direktur Waskita Karya, pada saat Tahun 2021 aset Waskita Karya tercatat sebesar 103

triliun dan utangnya mencapai 88,1 triliun dan mencetak rugi sebesar 1,09 triliun. Lalu pada saat Tahun 2022 aset tercatat mengalami penurunan menjadi 98,9 triliun dan utangnya turun menjadi 79,12. Terus beban bunga yang cukup besar karena adanya beban utang, sehingga pada 2022 mengalami kerugian sebesar 1,11 triliun ini sumbernya dari RKP 2022 Pak.

Saya ingin masuk ke penjelasan Bapak di Halaman 5, ini *kan* Bapak ingin meminta soal *right issue* ini. *Nah* di sini dijelaskan Pak tujuan dan manfaat PMN Tahun 2022, di poin duanya itu Pak meminta sekitar 3 triliun akan dialokasikan untuk penyelesaian Tol Kapal Betung dan Tol Ciawi-Sukabumi, tetapi di Halaman 9 status proses strategi *partnership* jalan tol ini, Bapak justru tidak memasukkan Pak soal tol kapal apa namanya Tol Kapal Betung ini Pak. Justru yang dimasukkan hanya tol Ciawi dan Sukabumi, itu pertanyaan yang pertama.

Terus yang kedua Pak, ini soal Tol Ciawi-Cigombong Pak. Ini *kan* sudah selesai, tapi yang belum selesai itu Cigombong-Cibadak terus Cibadak-Sukabumi Pak, terus bagaimana Bapak bisa meyakinkan investor untuk menawarkan ke investor sementara tolnya belum jadi Pak ? apakah investor bisa tertarik itu kalau barang yang belum jadi terus kemudian mau ditawarkan ?

Terus pertanyaan yang ketiga Pak, terakhir. Apakah setelah Bapak meminta soal 3 triliun tadi ini untuk *right issue* ini, semua permasalahan yang ada di Waskita Karya bisa tuntas dengan baik ? *nah* itu Bapak belum jelaskan ke kami secara rinci dan runut, kalau memang bisa misalnya dilakukan *right issue* ini apakah masalahnya terus bisa selesai Pak, karena jangan sampai setelah ini minta *right issue* terus permasalahannya juga tidak selesai. Bapak datang ke kami kalau hanya minta soal PMN ini Pak. Itu yang, yang perlu diperhatikan, kalau, kalau dalam kondisi rugi Bapak datang tapi kalau kondisi yang tidak yang baik-baik saja Bapak tidak pernah melaporkan itu.

Begitu kira-kira pertanyaan dari kami Pak, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih Pak Bahtra.

F – P. GERINDRA (BAHTRA) :

Ini soalnya uang negara ini Pak, Bang Eriko.

KETUA RAPAT :

Siap, siap, siap, siap.

Selanjutnya, Fraksi Nasdem silakan. Kakak Fauzi, Kakak Fauziyah.

F – P. NASDEM (FAUZI. H AMRO MSI.) :

Terima kasih Mas Fathan, Pak Dolfie.

Selamat datang Pak Eriko, Pak Dirut, Pak Bambang, Pak kawan-kawan dari Waskita Karya.

Sesuai dengan topik kita hari ini masalah *right issue*. Yang pertama Pak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang *right issue* ini. Pertama adalah saya belum melihat Pak mungkin di dalam ini mungkin dengan kawan-kawan sebelumnya roadmap daripada *right issue* dan mitigasi risiko daripada *right issue*. *Roadmap*-nya seperti apa Pak ? dulu mungkin waktu PMN yang Bulan November atau Desember itu dibahas kita sudah mendapat gambaran bahwa uang 3 triliun ini akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Betung, apa itu Palembang dan Jalan Tol Sumatera, Kayuagung-Palembang dan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi.

Nah sebenarnya Pak dengan PMN itu kita punya niat bahwa Waskita Karya ini bias *running* dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyelesaian problem Waskita. *Nah* kami juga belum melihat audit BPK Pak, audit BPK terhadap sisi keuangan Waskita Pak. Apa yang disampaikan kawan-kawan kita bicara kalau seandainya, kalau seandainya misalnya sahamnya laku, *running* Pak barang ini tapi kalau seandainya dia *nggak* laku apa yang harus dilakukan Pak, Pak Des ? ini *kan* dua problem sementara beberapa kasus dan beberapa temuan Saham Waskita laba bersih Waskita ini memang meningkat, tapi di satu sisi juga ada mengalami penurunan.

Nah kita lihat anak perusahaan Bapak, kita ini *kan* bicara induk Pak, tapi Bapak tidak terlalu berkomentar tentang anak perusahaan Toll Road, Waskita Realty, Waskita Infrastruktur, Waskita Konstruksi, Waskita Manufaktur. Artinya Pak kalau kawan-kawan seperti Pak Eriko dan kawan-kawan itu adalah pemain BUMN pak, lebih ke anaknya Pak orang itu mainnya begitu *loh*, yang pengalaman maksudnya Pak.

Saya melihat Pak bahwa kalau bicara dengan *kayak* Hutama Karya itu anak perusahaannya Pak begitu *loh*, anak perusahaannya, anak perusahaannya ada lagi anak perusahaannya, cucu perusahaannya. Jadi di lingkaran setan terkutuk itulah bermainnya seperti itu dan itu *enggak* bisa, *enggak* bisa ada orang luar Pak. *Nah* oleh sebab itu menurut saya keterbukaan informasi ini Pak Andreas penting juga Pak agar saham ini bisa layak jual dan kita tidak bisa belum melihat bahwa ada mitigasi risiko. Seandainya saham yang ditawarkan ini Pak Dolfie misalnya *oke* berhasil, bermanfaat bagi Waskita. Ini sangat membantu Waskita, tapi kalau dia gagal, *nah* ini apalagi risikonya *enggak* ada opsi lain Pak, karena ini BUMN. Ketika dia gagal, dia melapor ke kita, ketika dia berakhir dia melapor juga Pak Bahtra cuma laporannya positif, kalau laporan negatif rata-rata dia minta PMN seperti.

Nah, saya ingin pertama Pak tentang *right issue* ini kritik seni harus dibuat secara detail *roadmap*-nya seperti apa ?

Yang kedua, uang yang 3 triliun kemarin kita kasih PMN itu efektivitas penggunaannya seperti apa ? dan ada *enggak* temuan BPK baik terhadap neraca keuangannya ? apakah menguntungkan ? apakah merugikan bagi perusahaan ? *kan* kita bertanya, dulu dikasih PMN sudah selamatlah pikiran kita, tiba-tiba minta *right issue* lagi, nanti minta apalagi begitu. *Nah* ini dalam tanda kutip kita. Ini ada sesuatu Pak, *Nah* sesuatunya ini kita minta dasar-dasarnya Pak, *Roadmap*, kita minta temuan atau audit dari BPK dan keterbukaan informasi Pak tentang anak-anak perusahaan tadi. HK ini, Waskita ini induk perusahaannya, anak perusahaannya ada 7-8, cucunya ada berapa ? ini harus dijabarkan juga ke kita dan kalau orang-orang yang mengerti tentang BUMN ini Pak, anak cucu cicit itu lingkaran-lingkaran mereka semua dan saya terbuka *ngomong* apa adanya Pak.

Yang ketiga adalah kita minta di forum yang berbahagia ini Pak Dolfie, sebelum kita menyetujui adalah risiko, mitigasi risikonya seperti apa ? kalau dia berhasil targetnya meningkatkan laba perusahaannya berapa ? kalau dia gagal harus kita pikirkan seperti apa ?

Mungkin seperti itu Pak Dolfie dan Pak Fathan, terima kasih Pak.

Billahi Taufik Wal Hidayah.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wabarakatuh.

Kakak Fauzi terima kasih.

Jadi Waskita Teluk Betung Palembang tadi *ya* mandatnya ? Kampungnya Pak Fauzi *nih* Pak Des begitu *ya* ?

Baik Fraksi PKB, Pak Bertu atau Mbak Farida ? Pak Bertu.

F – PKB (BERTU MERLAS, S.T.) :

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Dirjen Kekayaan Negara beserta jajaran,
Direktur Utama Waskita Karya beserta Direktori lainnya dan Staf-staf Waskita Karya yang sempat hadir di acara ini,
Yang saya hormati juga Pimpinan dan Anggota Komisi XI.

Terkait *right issue* ini Pak, jadi sedikit saya menggugah ini saja Pak, apa nurani kita masing-masing saja. Saya mau cerita *nih* di kampung saya itu Pak, ada orang dapat warisan rumah, pekarangannya lebar Pak, pekarangannya lebar. *Nah* dia warisan itu sebagian dari warisan itu dijual sama dia Pak karena mau *nyekolahin* anaknya, kira-kira *kan*. Anaknya di sekolah yang mahal, apa

berkualitas dan anaknya pintar, jadi dia jual pekarangannya. Terus ada cerita lagi di kampungnya Pak Fauzi *nih*, di kampung Pak Fauzi ini sama dapat warisan pekarangan lebar dijual, tapi dijualnya untuk bayar utang, utangnya utang judi lagi, kira-kira *kan*. Nah saya berharap pertama Waskita Karya ini saya menganggap bahwa namanya pekarangan ini adalah saham Bapak, saya inginnya ketika ini terjadi *right issue*, ini uang *right issue* ini bukan untuk bayar utang, tapi untuk investasi yang lebih berharga lagi, satu itu Pak.

Terus kedua mengenai Tol Kapal Betung Pak, saya kira apapun kejadiannya saya mendukung Pak, itu dapil saya separuh, dapilnya Fauzi separuh Pak itu Pak. Arah Kayuagung itu dapil saya, arah Betung *enggak*, *enggak* ada Pak, *enggak* ada maksud itu, saya cuma karena atas nama dapil, mohon maaf Pak. Ruas jalan tol ini mungkin yang paling lambat Pak di Sumatera Selatan itu Pak, saya memperhatikan saja, saya memperhatikan bahwa Tol Kapal Betung ini paling lambat Pak, yang Utama Karya cepat-cepat, tapi Waskita Karya *nih* ruas yang paling penting di Sumatera Selatan, justru pelaksanaannya itu lambat.

Terkait masalah kualitas pekerjaan, saya kira saya sangat yakin sekali, saya sangat mengenal Waskita Karya, jauh sebelum saya menjadi Anggota DPR bahwa Waskita Karya ini adalah Tim konstruksi yang sangat profesional dan kualitas yang terjadi saat ini bagaimana cara mengatasinya ? saya percaya sama Waskita Karya bahwa itu akhirnya akan menjadi baik.

Terakhir Pak, terakhir waktu pelaksanaan Pak tadi Pak, saya kembali ke waktu pelaksanaan. Jangan sampai *molor* lagi seperti Bapak sampaikan di *ngobrol* tadi bahwasanya di Tahun 2023 selesai, ini selesai Pak karena itu ruas tol yang sangat ditunggu-tunggu Pak. Minimal Pak Eriko sepanjang jalan tol ini belum jadi kalau dari kota mau ke rumah saya itu macetnya setengah mati. *Insyallah* kalau tol ini jadi, sudah *enggak* macet lagi, sudah begitu saja. Saya akhiri.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lewat kebunnya Pak Bertu *enggak* Pak itu ? baik terima kasih Pak Bertu.

Yang, yang terakhir Fraksi Demokrat, silakan.

F – PD (SITI MUFATTAHAH, Psi., M. B. A.) :

Saya Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Ibu Mufattahah, silakan.

F – PD (SITI MUFATTAHAH, Psi., M. B. A.) :

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati yang ikut rapat hari ini dari Waskita beserta dari Kementerian Keuangan.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak, tetapi sebelum bicara tentang *right issue* kami ingin mendalami kondisi PT Waskita Beton sebagai anak dari Waskita Karya yang mengalami *default* atau gagal bayar, yang tadi mungkin juga *aja* sedikit menyinggung disinggung oleh rekan-rekan lainnya. Gagal bayar pembayaran kupon obligasi sebesar 2 triliun, pada saat obligasi diterbitkan dengan kondisi laba, namun setelah itu laporan keuangannya disajikan kembali *restate* dengan mengalami kerugian. Selanjutnya PT Waskita Beton lolos dalam PKPU dengan skema perdamaian dan atau homologasi. *Nah* ini satu hal yang membuat kami berpikir ulang ini bagaimana ini terkait isu sekarang lagi tahun ini kemudian dan sebelumnya juga begitu *ya* ? *nah* untuk hal ini sangat merugikan bagi para *bond holder* atau kreditur konkuren atau kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan dengan skema PKPU yang disepakati tersebut yang lebih banyak diuntungkan adalah perbankan. *Nah* itu yang pertama.

Kemudian yang berikutnya kami juga tidak habis pikir dengan penyajian kembali atau *restate* Laporan Keuangan Waskita Beton yang, yang disampaikan tadi, ini sudah kategori *fraud* menurut kami. Bayangkan investor melihat kinerja dari prospektusnya sebelumnya laba padahal sesungguhnya dalam kondisi rugi. *Nah* ini kasus lagi.

Kemudian yang berikutnya bagaimana peran pengawasan dari Induk Waskita Karya dalam melihat kondisi kinerja Waskita Beton sampai saat ini ? Selama ini *ya* alih-alih pengawasan, Waskita Karya bahkan punya utang sebesar 4 triliun di Waskita Beton. Bagaimana penyelesaian hutang induknya kepada Waskita Beton ? *Nah* bagaimana peran pengawasan Kemenkeu terhadap praktik dari kantor akuntan publik yang sudah seringkali di kejadian mulai dari Garuda yang melakukan *restate* ? *nah* ini mungkin Pak Dirjen *enggak* hadir di sini.

Kami menyarankan perlu dilakukan audit menyeluruh bahkan audit khusus terhadap Waskita Beton dan Waskita Karya sebelum melakukan *right issue*. Jangan-jangan Nanti banyak investor atau publik yang dirugikan. Rencananya dengan suntikan PMN pada Tahun 2022 ini yang sebesar 3 triliun, Waskita menargetkan dapat meraih dana publik dari *right issue* sebesar 3,9 triliun. Hal ini perlu disosialisasi dan *extra effort* dari *extra effort* agar mendapatkan dana publik sesuai dengan target di tengah reputasi di Waskita dan anak perusahaannya. *Nah* bagaimana mitigasi risikonya jika dana yang

diraih dalam *right issue* tersebut tidak sesuai dengan target ? ini *pun* juga disinggung oleh rekan-rekan yang lain.

Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kinerja laba rugi bersih Waskita, saya sampai mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa Tahun 2020 minus 9,8 triliun, 2021 minus lagi 1,8 triliun dan yang menarik laporan keuangan Waskita 2019 dilakukan *restatement* yang sebelumnya laba menjadi rugi minus 2,8 triliun. Ini angka yang sepertinya dipermainkan minus laba, kemudian ternyata laporannya rugi dan lain sebagainya, ini sesuatu yang luar biasa menurut kami. Apa yang menyebabkan Waskita melakukan *restatement* atau penyajian laporan keuangan tersebut ? apakah terdapat indikasi *fraud* dalam pelaporan keuangannya ? *nah*, hal ini menunjukkan pengendalian internal dalam penyajian laporan keuangan Waskita sangat lemah menurut kami sehingga berdampak pada risiko strategis, risiko reputasi, bahkan risiko hukum. Oleh karena itu kami ingin melakukan, kami dilakukan *assesment* yang perlu dilakukan *assesment* yang menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal termasuk anak-anak perusahaannya yang terlibat dan jika dibutuhkan meminta BPKP untuk melakukan *assesment* dan evaluasi terhadap pengendalian internalnya terutamanya terkait dengan *internal control for finance reporting*, ini perlu *nih*.

Dan berikutnya ini disampaikan dalam paparan bahwa utang bank anak usaha telah direstrukturisasi sebesar 25,71 triliun dari total target 28,66 triliun. Jadi kami melihat kondisi pendarahan atau *bleeding* Waskita eskalasi atau merembes ke anak-anak perusahaan karena memang bagian dari *supply chain*-nya. Kami kira Waskita perlu melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah lokalisir terhadap pendarahannya tersebut, *bleeding* tersebut dengan membuka jasa atau proyek *active* di luar Waskita atau mungkin melakukan model bisnis yang, sehingga anak-anaknya bisa independen dan mandiri, selanjutnya menyusun langkah mengurangi beban keuangan akibat bunga operasionalisasi jalan tol dan penundaan penerimaan termin untuk pelunasan pinjaman bank dengan negosiasi dan restrukturisasi dengan pihak kreditor dan investor lainnya, ini perlu dilakukan.

Kemudian yang terakhir, mungkin berkaitan dengan dana, dana *right issue* yang Tahun 2022 ini akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja proyek katanya begitu *ya* ? modal kerja proyek infrastruktur strategis perseroan dan apabila target *prosheat right issue* porsi publik tidak tercapai, Waskita harus mencari alternatif pembiayaan lain untuk modal kerja perusahaan tentunya. *Nah*, kami kira Waskita perlu menyiapkan *kontingensi*, *contingency plan* secara konkrit apabila target *prosheat right issue* isunya porsi publiknya tidak tercapai dengan menyiapkan alternatif pembiayaan lain yang konkretnya seperti apa kira-kira ? tentunya Waskita bukan perusahaan kecil dan bukan perusahaan baru yang belum paham tentang *right issue* ini dan tidak, tidak bisa normatif karena situasinya sudah *urgent*, sudah *emergency*, kalau di rumah sakit *emergency nih*. Jadi mohon dipikirkan kembali secara mendalam hal-hal yang menjadi kekhawatiran kami.

Terima kasih mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mbak Mufattahah ini dapilnya Garut Pak, Garut-Sumedang, Cisumdawu ya ?

F – PD (SITI MUFATTAHAH, Psi., M. B. A.) :

Garut-Tasik Pak.

KETUA RAPAT :

Garut-Tasik.

F – PD (SITI MUFATTAHAH, Psi., M. B. A.) :

Enggak dilewati tol.

KETUA RAPAT :

Waskita dilewati *enggak tuh* ?

F – PD (SITI MUFATTAHAH, Psi., M. B. A.) :

Enggak, enggak dilewati.

KETUA RAPAT :

Baik selanjutnya Fraksi PKS, silakan.

F – PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.) :

Saya Pimpinan. Oke terima kasih.

Pimpinan Komisi XI, Teman-Teman Komisi XI yang terhormat, Bapak, Pak Dirjen sedang keluar, tapi jajarannya ada ya ?, Kemudian Bapak Direktur Utama PT Waskita beserta jajaran.

Iya tadi Teman-Teman sudah banyak memaparkan dan saya kira Bapak sudah menangkap begitu ya apa yang menjadi *konsen* dari teman-teman semua. Saya juga melihat hal yang tidak berbeda Pak ya ? dan ini risiko ya ? Risiko dari ketika Waskita menginginkan ada *right issue* dari Pemerintah, tentu kita di Komisi XI harus melihat performa lebih dahulu sebagai sebuah pertimbangan apakah layak untuk Pemerintah ini memberikan atau mengambil *right issue* itu ? karena performa keuangan dan ini disampaikan sendiri oleh Bapak di Halaman 13, salah satu kecil saja yang tadi juga sempat disinggung

oleh Teman-teman, ini *kan* kalau dilihat dari pertumbuhan ekuitas itu minus, minus 9,21. Iya sementara pertumbuhan liabilitasnya itu 4,07, sehingga di bawahnya sehingga DER-nya *debt to equity ratio*-nya itu di atas 3, diatas 3. Padahal kita tahu kondisi ini *kan* sangat tidak menggambarkan keuangan yang sangat tidak sehat *banget* begitu, di bawah 1. Jadi sudah di atas 3, iya ini artinya *right issue* pada akhirnya akan memunculkan satu, satu dugaan bahwa diminta *right issue* untuk memperbaiki keuangan yang tidak sehat begitu ya.

Nah padahal ketika *right issue* salah satu tujuannya kalau investor, dari sisi investor itu bagaimana ketika kita membeli saham dari satu perusahaan devidennya akan lebih banyak, *kan* begitu, harapannya begitu, tetapi ketika saham itu ditanamkan kepada satu kondisi perusahaan yang keuangannya sedang tidak sehat *kan* risikonya tinggi apalagi ini yang dipakai bukan uang, uang sembarangan, yang dipakai adalah uang negara, iya jadi ini satu pertimbangan.

Kemudian juga kalau kita melihat *right issue kan* ditawarkan publik juga. Iya di Halaman 17 disampaikan bahwa *right issue* tahun ke publik Tahun 2021 itu dari 9,4 ditargetkan 4 triliun untuk publik, tapi yang terserap 1,5. Ini artinya publik tidak berminat *kan* begitu karena melihat kondisi keuangan, sehingga harapannya adalah Pemerintah yang akhirnya menyerap melalui PMN dan akibatnya saham Pemerintah *kan* menjadi sangat besar begitu dan ketika saham sangat besar, tetapi diletakkan kepada BUMN yang berisiko tinggi, ini *kan* juga berat. Jadi dalam pandangan, pandangan saya ketika meletak uang Pemerintah, uang negara diletakkan pada perusahaan dalam porsi kepemilikan yang sangat besar, tetapi perusahaannya sedang tidak sehat, sehingga *nih* digunakan untuk Kementerian Keuangan, ini juga mengakibatkan risiko besar bagi uang negara.

Iya jadi kita berpikir bahwa mengambil *right issue* dari PT Waskita bagi negara itu sangat-sangat berisiko tinggi dan kita juga melihat mungkin ini bukan karena semata-mata karena Waskita, karena kita tahu bahwa Waskita sempat membaik di tahun-tahun sebelumnya, kemudian ketika kondisi keuangan Pemerintah tidak bisa lagi memberikan pendanaan, kemudian ada Covid-19 pula begitu padahal infrastruktur terus berjalan akibatnya *kan* sempat *mandeg* begitu ya dan sempat kesulitan. Jadi kalau menurut pendapat kami agak sulit begitu Pemerintah mengambil ini risikonya terlalu tinggi mengambil porsi besar, sementara kondisi keuangan tidak sehat.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bu Anis.

Selanjutnya PAN. PAN tidak ada ? PPP tidak ada juga. Baik semua fraksi sudah, Pak Dolfie ? cukup ? Pak Eriko ?

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :

Sedikit.

KETUA RAPAT :

Silakan.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :

Baik terima kasih Pak Fathan, Pimpinan, Pak Dolfie, seluruh Anggota Komisi XI yang saya banggakan.

Pak Dirut seluruh juga yang menyertai yang tidak saya dapat sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat, begitu juga dari Kementerian Keuangan. Pak Dirjen mungkin di Banggar *ya* barangkali *ya* ? kami juga memang nanti sebentar lagi izin Pimpinan dan juga Pak Dirut semua untuk hadir juga di sana, tapi saya tergerak karena begini Pak Dirut menurut saya, ini *kan* tadi sudah banyak tanggapan teman-teman, tadi Adinda saya Bung Barta juga tadi menyampaikan, begitu juga Pak Fauzi, seluruh menyampaikan.

Saya kebetulan *kan* karena lama dua periode di Komisi VI, memang inilah salah satu yang menjadi satu, satu katakan bukan kendala *ya* ? satu hal yang memang perlu disinkronkan juga, karena dari segi kinerja dan korporasi *kan* ada di Komisi VI yang selama ini mengikuti, tetapi kalau sudah berkaitan dengan masalah keuangan apalagi PMN, pasti ke Komisi XI. *Nah* ini yang terkadang tidak bersambung *ya* ininya.

Nah Pak Dirut menurut saya ini *kan* bicara pada waktu yang lalu Pak Dolfie, Pimpinan pernah menyampaikan bahwa evaluasi dengan Menteri Keuangan mengenai PMN yang diberikan itu, *return*-nya tidak, tidak signifikan. *Nah* saya rasa Pak Dirut, Bapak dan seluruh jajaran lebih baik terbuka, ini sebenarnya untuk apa ? apakah ini karena penugasan dari Pemerintah ? karena begini, ini saya ingatkan pada kita semua juga, ini berisiko Ibu/Bapak, ini *kan* direkam, jangan nanti sekian tahun lagi Pak Dirut kemudian kita akhirnya menjadi repot karena masalah ini.

Itu kalau boleh saya interaktif Pak Fathan, yang anak atau cucu perusahaan yang bermasalah itu yang dengan KPK itu Pak ?

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA :

Izin.

Waskita Beton Precast itu salah satu anak perusahaan Waskita.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :

Nah karena saya di Komisi VI, saya pernah di Komisi VI, saya paham betul yang namanya anak dan cucu perusahaan tidak bisa juga diawasi oleh, oleh DPR, iya Pak Masinton. Ini kebetulan Pak Masinton baru datang ini. *Nah* ini bagaimana risikonya terhadap soal hukum ini ? nanti Pak Masinton juga mesti memberikan pencerahan ini.

Loh sekarang begini, nanti kita setuju ini saudara-saudaraku, Pak Fathan, Pak Dolfie kita semua, tahu-tahu terkait masalah hukum, kalian ini *ngapain* saja di Komisi XI menyetujui itu, tetapi ada problem masalah hukumnya ? apakah permasalahan hukum di anak atau cucu perusahaan terus kemudian namanya induk perusahaan terbebas ? bisa mengatakan *oh* saya tidak tahu hal itu, *kan* tidak bisa seperti itu. *Nah* ini penting juga menurut saya Pak Dirut dan juga jajaran, kita ini *kan* mau semua berjalan baik. Kami *nih* wakil rakyat sebentar lagi 2024, kalian ini di Komisi XI *ngapain* saja ? iya-iya saja kasih PMN, iya-iya kasih PMN. *Nah* kebetulan Pak Dirjen *nih* memang situasi-situasi sensitif *nih* datang dia, ini yang buat serba salah, kadang-kadang genting-genting ini, *enggak* jadi di Banggar ? ini nanti saya baru mau ke sana Pak, sudah beres Pak ? *oh* baik kalau begitu, berarti aman Pak, tapi *kan* belum tentu juga di Komisi XI beres *kan* Pak Rio *kan* ?

Nah saya perlu mengingatkan ini, itu pertanyaan dari teman-teman tadi termasuk Bung Bahtra supaya masih kurang *kenceng* menurut saya *ya* ? Harusnya kita dalam betul, *Nah* untuk apa ini uang? kalau memang untuk penugasan Pemerintah supaya kami semua ini, ini untuk penugasan Pemerintah saudara-saudaraku, rakyatku. *No other choice*, ini harus lewat dari Sumatera Selatan, dari tempatnya Bu Siti di apa Cisumdawu misalnya wajar, itu atau dari tempat Pak Fauzi Amro mungkin lewat dari dekat kebunnya atau apapun itu *lah*, dari tempat Pak Sihar saya *enggak* tahu apakah lewat ataukah tidak. *Nah* Pak Dirut, daripada kita nanti berpanjang lebar dengan asumsi mikro, makro segala macam, padahal ujung-ujungnya ke sana saja semua, termasuk yang namanya divestasi yang contoh ini di kampung saya Tebing mana itu Pak, Medan-Tebing Tinggi *ya* Pak Dirjen *ya* ? Tebing Tinggi, bukan-bukan yang dilepas itu.

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA :

Medan-Kualanamu.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :

Hah ?

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA :

Medan-Kualanamu.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :

Yang dilepas sahamnya itu, *Nah itu kan* kalau dihitung *value*-nya sangat murah, padahal 5 tahun, 10 tahun lagi itu luar biasa pasti *value*-nya, *kan* sayang si BUMN karyanya yang sudah susah payah, capek-capek tidak menikmati hasilnya. *Nah* kenapa *enggak* begini saya tawarkan pada Teman-Teman Komisi XI dan juga kepada Pak Dirjen begitu juga kepada Pak Dirut, kenapa *enggak* INA saja yang mengambil alih ? betul, ini bisnis, nanti dijual 10-20 tahun lagi, *value*-nya mungkin bisa 15, 20 kali lipat. Kenapa tidak mekanisme ini kita tempuh daripada nanti PMN ? *kan* begini, apakah 3 triliun juga sudah menyelesaikan Pak Dirut ? menurut saya belum, dengan penugasan yang demikian banyak jangankan 3 triliun, berapa sebenarnya yang dibutuhkan ? mungkin luar biasa besar, tapi kalau itu untuk kepentingan rakyat banyak, untuk peningkatan ekonomi yang luar biasa, untuk peningkatan *value* dari di daerah tersebut kenapa tidak ? kita semua mengambil risiko juga setuju, karena untuk kebaikan rakyat, *nah* ini maksud saya Pak Dirut.

Saya nanti minta izin kalau Bapak tidak *pun* menjawab pertanyaan saya, sangat wajar karena saya harus meninggalkan nanti ke Banggar, Bapak jawab tertulis *monggo* Pak, tapi saya minta Bapak jelaskan kepada saudara-saudara saya semua ini, kami ini bertanggung jawab semua Pak. Kalau hanya memikirkan Dapil DKI Jakarta *enggak* ada Pak, tapi ini mewakili semua, Pak Sihar tadi juga mau nanya mengenai harga saham nya bagaimana dengan begini ? jangan nanti dibeli tahu-tahu ternyata baru sebentar sudah anjlok. *Nah* ini bukan yang saya dari *trading* Pak Sihar, bukan, tapi orang bisnis harus berpikir bisnis Pak, jadi tolong Pak Destiawan dan Saudara-Saudaraku semua yang hadir di sini terutama Pak Dirjen, kalau saya yakin Pak Dirjen ini orang teliti, terbuka *lah*. Mungkin kami tidak mendalami seperti Komisi VI, tapi kami juga harus tahu sebenarnya seperti apa *sih* kondisinya Waskita Karya yang sesungguhnya, sehingga jangan *kan* sebegitu, lebih dari sebegitu kenapa mesti tanggung sebegitu ? itu yang saya sampaikan pada waktu yang lain-lain juga Utama Karya dan lain-lain, untuk apa Pak dikasih 3, 10 *kan* besok juga, tetap juga di ICU.

Nah ini, ini barangkali Pak Dirut. Saya tidak mau menghakimi, tapi mari kita betul-betul secara terbuka menyampaikan supaya teman-teman Komisi XI *pun* tidak ragu-ragu serba sulit mereka Pak, diiyakan seperti seolah-olah *kok* Komisi XI ini *enggak* mengerti hitung-hitungan *ya*, padahal sudah orang-orang pengalaman semua di sini. *Nah* tahu-tahu tidak diberikan, berisiko buat BUMN karya yang kita banggakan ini, bagaimana dia mau kerja, melaksanakan tugas dari Pemerintah, *ndak* ada dananya, berdarah-darah (*bleeding*), siapa yang mau beli ? nanti akhirnya orang tawar murah dari luar negeri *kan* itu juga tidak bermanfaat. *Nah* ini, ini penting juga bagi kita semua melalui Meja Pimpinan dan teman-teman apakah kita bisa membuat mekanisme yang lebih baik dengan melibatkan INA dan lain-lain, *why not* ? karena pasti nanti *value*-nya ini luar biasa. Sekarang mungkin belum, pasti siapa yang membeli ini 10, 20 tahun lagi untungya luar biasa Bung Charles, itu pasti.

Jadi itu barangkali Pak Dirut, Pak Destiawan, Pak Rio.

KETUA RAPAT :

Cukup ?

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :

Kita semua marilah mencari jalan keluar yang terbaik dari sini. Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Merdeka !

KETUA RAPAT :

Wa ‘alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

F – PG (MELCHIAS MARKUS MEKENG) :

Ketua bisa saya sedikit Ketua ?

KETUA RAPAT :

Iya silakan singkat-singkat saja ya.

F – PG (MELCHIAS MARKUS MEKENG) :

Singkat tapi padat Pak ketua, karena Ketua senang yang padat-padat.

Terima kasih Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Pak Dirjen, Pak Direktur, Direksi Waskita Karya dan jajaran.

Saya tetap pertanyaan saya yang pertama kali waktu kita Raker dengan Ibu Menteri soal penyehatan, saya mau tahu dulu *nih* sakitnya sakit apa ? tolong dikasih, dijelaskan ke kita, sakit apa ini ? apakah sakitnya kronis ? apakah sakitnya yang bisa pakai obat biasa saja atau sakit yang perlu *long term treatment* ? itu tolong dijelaskan dulu kepada kita supaya karena saya baca di ini bahan presentasinya ini *kan* Nomor 1 manfaat privatisasi juga penyehatan.

Nah kalau penyehatan dari PMN, saya melihat bahwa ini perusahaan ini sebetulnya banyak mengerjakan proyek-proyek yang tidak *visible*. Jadi artinya dipaksakan proyek-proyek yang secara ekonomikal tidak, tidak masuk ini tapi dipaksakan, akhirnya sakit, kalau sakit datang lagi ke PMN. PMN *kan* ini masuk ke dalam unsur permodalan ya kalau kita jumlahkan, kalau 7,9 triliun 2021 sudah terima Pak ya ? sudah terima ya ? *nah* kalau 2022, 3 triliun kurang lebih hampir 11 triliun, 11 triliun masuk ke dalam apa unsur permodalan. *Nah*, dari unsur permodalan 11 triliun mungkin bisa ke bank 3 kali lipat, jadi bisa pinjam 30 triliun.

Nah, 30 triliun ini kalau dimasukkan ke dalam proyek-proyek yang, yang katakanlah kurang *visible*, ini akan menjadi sakit lagi. Karena kalau bangun jalan tol *kan* kalau sudah selesai tidak langsung untung, *nah* di sinilah berdarah-berdarahnya. Mungkin tol yang sudah lama dan arus kendaraannya sudah penuh di situ bisa menopang. *Nah*, seberapa banyak jalan tol yang dimiliki oleh Waskita yang bisa meng-*cross* subsidi jalan tol yang baru ? kalau yang lama yang bagus-bagus sudah dijualin, yang tersisa di dalam portofolio Waskita adalah proyek-proyek baru yang tentunya akan membawa, menanggung kerugian dan ini yang membuat sakit. *Nah*, ini tolong dijelaskan kepada kita apalagi kalau publik masuk kedalam ini *kan* masuk ke pasar modal *ya* Pak, *right issue* ?

Saya mau tanya Pak Dirjen, ini pasar *enggak* serap apa siapa yang mau serap ini nanti ? kalau *enggak* terserap *kan* tidak, tidak terjadi, apa ada *stand by buyer*-nya ? *Nah*, jangan sampai negara harus jadi *stand by buyer* lagi. *Nah* tolong dijelaskan kepada kita, itu, itu penting, yang membuat tidak sehat itu apa ? coba kita, kita jelas begitu *loh* karena kalau ini kita tidak jelas, masalah ini akan menjadi terulang, terulang kembali, akan datang lagi kepada kita *ya* modelnya sama lagi. *Nah* ini tolong dijelaskan kepada kita supaya apa, apa yang kita putuskan itu bermanfaat untuk perusahaan dan juga kalau ini ke pasar modal tentunya investor yang mau masuk, dia harus melihat potensi harga saham itu naik. Kalau *enggak*, kalau *enggak* nanti kayak Garuda zaman dulu. Pas di-*go-public* *enggak* naik-naik sampai sekarang jadi turun. *Nah*, jangan sampai Waskita juga menjadi saham yang model kayak begitu. Jadi itu yang saya ingin minta dijelaskan kepada kita semua di sini tentang sakit yang, yang sebenarnya itu sakit apa ? coba kita bisa kasih obatnya yang *pas*, *enggak* salah kasih obat.

Saya rasa itu saja Pak Ketua terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih senior kita Pak Mekeng, obat dan penyakitnya.

F – P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM.) :

Boleh ?

KETUA RAPAT :

Silakan Gus Irawan.

Sudah lama *nih* beliau *enggak* muncul *nih*.

F – P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM.) :

Iya terima kasih.

Pak Fathan, Pimpinan Pak Dolfie,
Bapak-Ibu Anggota Komisi XI,

Pak Dirjen dan jajaran,
Pak Dirut Waskita dan seluruh jajaran.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Sore.
Salam Sejahtera untuk kita sekalian.

Saya kira hampir *ya* senada sebetulnya apa yang disampaikan oleh teman-teman begitu. Sesungguhnya *kan* kalau mau kita konstruksi ini *right issue*, ada kebutuhan dana bagi ingin mengembangkan perusahaan, *right issue* itu adalah sebetulnya hak mendahului bagi pemegang saham yang ada. *Nah*, saya kira karena keuangan negara juga lagi tidak longgar begitu *ya*, iya hak itu *enggak usah* dulu *lah* kasih *ya* biar ke publik saja *lah* bagi-bagilah ke publik saya kira Pak Mekeng, iya *kan* ? *kan* ini di alokasi 3 triliun, Pemerintah 900 miliar kurang lebih begitu ? yang diharapkan dari publik, tapi lagi-lagi ini hak, hak itu *kan* selalu pasangannya adalah manfaat begitu *lah*, tapi karena kemudian keuangan negara sedang tidak bagus-bagus amat, sudahlah hak itu kita serahkan ke publik saja, lempar saja iya nanti yang tidak terserap publik baru kemudian mungkin *ya* kita ambil *lah* Pak Andreas, begitu Pak.

Enggak laku ? *nah*, *nah*, *lah* makanya *right issue* itu selalu melihat momentum Pak, apakah sekarang momentum yang tepat untuk kemudian melakukan *right issue* ? iya mohon maaf itu ada sedang kemudian *sub sequent event* yang tadi dari Pak Andreas *ya kan* ? apakah itu *kan* bisa berpengaruh ke induk Pak walaupun itu terjadi di anak perusahaan. Berarti ini bukan *timing* yang *pas*. Situasi ekonomi yang sedemikian juga rasanya bukan *timing* yang *pas* juga untuk *right issue*, iya Pak ? iya itulah begitu *loh*.

Tapi lagi-lagi kita pun tahu ini sebetulnya *ya* bukan *right issue* yang pernah dulu waktu kuliah kita pelajari begitu *lah*, ini *kan* *udah* salah dari awal Pak. Saya sial saja sekarang ada di Komisi XI begitu, *ya* harus, *ya* harus memberikan keputusan begitu. Kalau boleh saran saya Pimpinan keputusan kita, hak itu sudahlah *enggak usah* digunakan dulu, kasihlah berbagi dengan publik untuk mendapat keuntungan dari Waskita yang akan berkembang tumbuh baik ke depan begitu. Iya *kan* ? Hak itu sekali lagi, ini hak, pasangannya adalah manfaat karena kita lagi tidak lapang, tidak longgar, iya *kan* boleh negara berbagi dengan masyarakatnya begitu ? *ndak usah* diambil semua Pak Rio, biar saja masyarakat Pak menikmati itu. Saya *enggak* tahu dulu ini tapi *kan* diawali, saya *enggak* tahu, nanti mungkin dijelaskan.

Ini *kan* karena penugasan sebetulnya di awalnya begitu *kan* ? Pak Rio *enggak* mengangguk dia, iya tolong nanti jelaskan *lah* tapi setahu saya emang penugasan untuk sesuatu yang sesungguhnya secara bisnis tidak *visible* begitu loh ? iya *kan* saya kira 2012 IPO di Waskita iya Pak *ya* ? saya agak sedikit menikmati juga keuntungan berdagang sahamnya WSKT iya Pak ?

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA :

Iya WSKT.

F – P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM.) :

Tapi belakangan saya sudah bertobat, tidak main saham lagi, *enggak* tahu saya perkembangan Saham Waskita sekarang, tapi rasanya dari buku yang ada kalau berdarah-darah begini *sih udah* pastilah *enggak* menarik bagi investor begitu. Jadi judulnya *enggak usah* gagah-gagahan *right issue lah* Pak, PMN saja *udah* begitu, *iya kan ?* kalau *right issue*, saran saya sudah *enggak usah* ambil hak itu, serahkan *ajalah* ke pemegang saham baru ke publik itu atau pemegang saham lain yang sudah dimiliki publik masih berapa ? *nah*, faktanya memang ini *nggak* menarik dari waktu ke waktu, saham publik *kan terdilusi* begitu ? *iya enggak* menarik atau ada *enggak* cara lain Pak Rio supaya kita *enggak* ikut kemudian semacam melegalisasi yang salah-salah di masa lalu itu sekarang begitu ? apa solusi terhadap ini ?

Erick Thohir ?

Oh bisa ya ? Pak Presiden nanti Prabowo Pak bukan Erick Thohir, wakilnya mungkin masih kalau PKB mau dukung Erick *kan* begitu ? *iya* kalau begitu saya sampai di sini saja, kami tunggu nanti presidennya Prabowo *lah*, terima kasih Pimpinan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Ada Nasdem *tuh*.

Wa 'alaikum salam.

F – PKS (H. HIDAYATULLAH) :

Izin ketua.

KETUA RAPAT :

Baik.

F – PKS (H. HIDAYATULLAH) :

Sedikit. Hidayatullah

KETUA RAPAT :

Pak Hidayatullah, terus Mbak Puteri.

Pak Hidayatullah dulu *deh*, Pak Sihar juga.

F – PKS (H. HIDAYATULLAH) :

Iya.

KETUA RAPAT :

Iya silakan.

F – PKS (H. HIDAYATULLAH) :

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan Komisi XI yang terhormat dan Rekan-rekan sekalian,
Pak Dirjen dan Pak Dirut serta seluruh jajaran.

Saya ingin melengkapinya saja *ya* dari banyak pertanyaan-pertanyaan, di antaranya salah satunya tadi ini uang *right issue*, kalau laku untuk bayar utang apa *enggak* begitu ? saya justru kebalikannya mau tanya komitmen dari Bapak, apakah nanti hasil *right issue* ini justru mau nambah utang ? karena aset kita sekarang itu 103, tapi total utang sudah 88. Jangan sampai nanti hutangnya lebih besar dari asetnya.

Sekarang *debt to equity ratio*, sudah tidak sehat. Ini pernah saya tanyakan sebelumnya, ini ada kaitannya memang *kan* APBN kita itu dibatasi maksimal 3% dari PDB, defisitnya. *Nah*, saya *enggak* mau karena di sana sudah dibatasi 3%, lalu hutangnya muncul di sini, dari sekian banyak BUMN, sehingga kalau ditotal sesungguhnya utang kita ini lebih dari 3% terhadap defisitnya lebih dari 3% terhadap PDB. *Nah* jadi saya harap ada komitmen dari Bapak, ini bukan untuk menambah utang. Tadi memang ditanya sakitnya apa *sih* ? tapi saya terlepas dari sakitnya apa ?

Saya berharap ini tidak untuk menambah utang karena memang untuk menambah utang lagi, untuk menambah utang lagi itu perlu penguatan modal. Kalau tidak seperti kata Pak Mekeng, bank *enggak* mau kasih, *nggak* mau kasih *utang kan* kalau modelnya sudah mendekati minus, jadi perlu di kuatkan. *Nah*, ini yang menjadi *konsen* kami khususnya, tapi memang keyakinan kami dalam situasi sekarang memang saham tidak akan laku seperti kondisi sekarang. Jadi perlu dipertimbangkan momentum untuk melakukan *right issue*, sehingga tidak menjebak, tidak menjebak kondisi dari Waskita Raya yang dulunya kinerjanya sangat meyakinkan, sekarang sudah hampir berada belum di dipinggir jurang, tapi sudah hampir berada di tepi jurang.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Masih ada atau terakhir ? Mbak Puteri terakhir.

F – PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.) :

Terima kasih Pak Fathan.

Pak Dolfie dan seluruh Anggota Komisi XI,
Pak Rio, Pak Dirjen beserta seluruh jajaran dari Kementerian Keuangan dan
Pak Musyid selaku Direktur Utama, benar Pak ?

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA :

Destiawan, Bu.

F – PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.) :

Kita soalnya belum pernah ketemu Pak, jadi saya agak-agak masih
bagaimana begitu perlu kenalan dulu sama Pak Dirut *nih*.

Yang pertama kalau soal *right issue* tadi sudah dilibas habis sama
senior-senior, jadi saya langsung ke aspek yang lain. Pada Tahun 2019 yang
lalu sampai dengan beberapa tahun terakhir itu *kan* Waskita telah
menyelesaikan Pembangunan Tol Japek (Jakarta-Cikampek) dan imbasnya
adalah sampai dengan hari ini masih ada saja banjir di beberapa pemukiman
sekeliling situ yang melintasi dapil saya di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan
Purwakarta dikarenakan Waskita ternyata tidak membenahi aspek lingkungan
yang terdampak karena pembangunan jalan tol layang tersebut dan ini banyak
sekali *komplain* Pak yang masuk ke saya sampai dengan hari ini mereka masih
mengalami banjir menahun semenjak pembangunan tersebut.

Jadi saya sangat berharap PMN ini *kan* juga *kan* ada PMN, ada *right
issue*. PMN berasal dari APBN yang merupakan uang pajak kami-kami dan
masyarakat yang ada di dapil kami juga. Jadi semoga pembangunan Jalan Tol
Bogor-Ciawi dan juga yang ada di Sumatera nantinya tidak mengganggu dan
diperhatikan aspek lingkungannya, supaya ke depannya ketika Waskita
membangun jalan tol selain manfaat ekonominya jalan, itu tidak ada efek
negatif lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat. Iya kalau jadi masyarakat
kasihan *ya* Pak, sudah PMN untuk BUMN dari APBN terus *udah* begitu nanti
mereka kena dampak banjirnya, terus efek ekonominya juga *kan* perlahan-
lahan begitu munculnya, *enggak* langsung muncul begitu. Jadi kita sangat
berharap lain kali Waskita lebih memperhatikan aspek lingkungan dari
pembangunannya dan yang kedua ini *kan* di sepanjang jalan yang tadinya
dilewati oleh truk dan juga bis, itu *kan* banyak UMKM yang tersebar begitu dan
ketika ada jalan tol baru tentu masyarakat lebih memilih menggunakan jalan
tol. Jadi jalan yang biasanya mereka lalui itu biasanya sepi dan ini sudah terasa
di dapil saya juga.

Banyak pengusaha UMKM, hotel dan juga restoran, di situ yang
akhirnya kehilangan pekerjaan. Di kala ekonomi sedang sulit seperti ini saya
sangat berharap dari Waskita sendiri nanti akan ada solusi untuk para pelaku

UMKM yang akan ditinggalkan oleh para pengguna jalan, sehingga nanti mereka akan tetap mempunyai cara untuk mencari nafkah. Jadi tidak ada lagi cerita-cerita yang selama ini terjadi di Jalan Jakarta-Cikampek yang sekarang masih terjadi.

Demikian Pak Fathan dari saya terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh

Baik semua fraksi dan tambahan teman-teman telah memberikan pandangan, respon dan juga masukan-masukan untuk *right issue* Waskita.

Sebelum saya berikan Pak Dirjen, Pak Dolfie ada catatan-catatan, silakan Pak Dolfie.

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P) :

Terima kasih Ketua Rapat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI,
Pak Dirjen beserta jajaran direksi yang kami hormati,
Bapak-Ibu Anggota yang terhormat.

Jadi skema ini, skema *right issue* dengan 3,9 triliun yang diajukan, 3 triliunnya itu bersumber dari PMN yang sudah kita sepakati pada saat Tanggal 15 Desember 2021 di dalam Rapat Kerja Bersama Menteri Keuangan dengan sejumlah catatan yang kita berikan kepada PT Waskita Karya, antara lain agar menyampaikan *roadmap* dan dari restrukturisasi bisnis dan *refocusing* bisnis dalam rangka peningkatan efisiensi, kemudian di sini ada tata kelola dan manajemen risiko, kemudian juga PT Waskita Karya mempercepat memperlihatkan perbaikan rasio keuangan, total arus kas dan aktivitas operasi positif pendapatan usaha kembali ke kapasitas normal dan laba bersih positif.

Jadi di dalam Rapat Kerja kita yang Tanggal 15 Desember 2021, kita telah menyetujui pemberian PMN 3 triliun kepada Waskita, yang 3 triliun ini kemudian dibelikan saham melalui mekanisme *right issue*, sehingga saham Pemerintah pada Waskita Karya itu tetap berada pada angka 75,35% dan 24,65%. *Nah*, yang belum dilaporkan kepada kita di dalam pembahasan itu adalah yang 0,9 ini. Bagaimana prospeknya ? dan ini *kan* kalau dibandingkan *kan* kecil *ya* ? kecil besar relatif, tapi kalau kita bandingkan dengan *right issue* yang tahun sebelumnya dari target 4 triliun, hanya terserap oleh publik 1,5 triliun.

Nah kalau kita lihat yang publik 0,9 untuk tahun ini 900 miliar, itu prospeknya seperti apa ? kemudian di sini juga sudah mulai dipikirkan oleh Waskita juga apabila 900 ini tidak terserap di pasar itu akan mencari alternatif

pembiayaan yang lain. Jangan-jangan kita lebih, lebih condong ke alternatif pembiayaan Pak. Kalau lihat pengalaman tahun lalu hanya terserap kira-kira 37%, taruhlah tahun ini dari 0,9 ini bisa terserap 50% atau 40% misalnya, *nah* sisanya itu yang harus dipikirkan.

Jadi ini kepada Bapak-Ibu Anggota yang terhormat untuk kita bisa tahu skemanya bahwa yang 3 triliun sudah kita sepakati, yang belum dilaporkan adalah terkait 0,9. Karena pada saat raker angka ini belum keluar 0,9 yang untuk porsi publiknya, itu saja untuk kemudian bisa dijelaskan ini strategi dari *right issue* yang 0,9 kalau *enggak* terserap, alternatif pembiayaan lainnya seperti apa ? karena di sini di Halaman 17 Waskita sendiri sudah mulai memikirkan bahwa apabila tidak tercapai, maka akan mencari alternatif pembiayaan yang lain, *nah* ini mungkin yang perlu dijelaskan juga.

Itu saja Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih atas masukan dan Pak Dolfie.

Saya persilakan Pak Dirjen memberikan beberapa jawaban *high light*, nanti sebelum kita ambil kesimpulan. Silakan.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Baik terima kasih Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Izinkan kami terhadap pertanyaan dari Pak Andreas mengenai *roadmap* penyehatan. Sebagaimana kita ketahui itu disajikan dalam *Slide 15*, nanti kami sampaikan *update*-nya Pak. Yang pertama, memang sekaligus mau menjawab yang disampaikan oleh Pak Mekeng. Jadi kalau kita lihat perusahaan ini asetnya tumbuh secara cepat tanpa didukung oleh kemampuan ekuitas, itulah sebabnya salah satu dari aspek penyehatan selain PMN, kita juga meminta ke Waskita untuk melakukan divestasi. Dua minggu yang lalu, ini sekaligus menjawab pertanyaan terkait dengan keterlibatan LPI, 2 minggu yang lalu LPI, INA beserta dengan *partner* investornya telah melakukan penandatanganan pembelian ruas dari Waskita, ada 2 ruas. Yang satu SMR dan 1 PTTR, itu kalau saya *enggak* salah transaksinya sekitar 5,8 triliun dan pada saat yang bersamaan hutang Waskita di bank Pemerintah sekitar 6 triliun Pak *ya ?* itu EBT-nya juga beralih. Jadi itu salah satu, salah satu atau salah dua dari penyehatan. Nanti kami sampaikan *up date*-nya Pak, apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan 8 stream penyehatan ini.

Terkait dengan WSBP, kita ketahui bahwa Kejaksaan mengumumkan maka Waskita telah mengeluarkan rilis. Intinya Waskita akan mendukung penyelesaian dari WSBP. WSBP itu juga merupakan bagian dari penyehatan perusahaan Pak, kita menginginkan apa namanya di dalam *restructuring* apa yang menjadi temuan, itu seyogyanya oleh Kementerian BUMN untuk

ditindaklanjuti. Ada 4-5 anak perusahaan Waskita yang ikut di-*restructuring* Pak pinjaman-pinjamannya terhadap bank Pemerintah.

Nah, terkait dengan *right issue*, betul yang tadi disampaikan oleh,

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Pimpinan, Pimpinan.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Siap.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Pimpinan. Mohon ini pimpinan.

Yang saya tanyakan Pak Rio, saya paham masalah yang segala macam, tapi pengaruhnya terhadap Laporan Keuangannya sendiri bagaimana Pak Rio ? karena *kan* ini, ini penting. *Kan* 2,5 triliun itu adalah angka yang sangat signifikan.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Mungkin nanti saya minta Direktur Keuangan untuk menyampaikan karena seingat saya ada *restatement* Pak *ya* terkait dengan ini. Jadi itu nanti Direktur Keuangan saya minta menjelaskan kepada kami.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Itu sudah disampaikan pada saat kita menyetujui PMN di Bulan Desember lalu atau tidak ? karena itu penting itu.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Belum Pak, iya baik.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Jadi sebetulnya mohon catatan Pimpinan bahwa persetujuan pada saat itu sebelum dilakukan *restatement* terhadap Laporan Keuangan, ini, ini sangat penting *nih* karena kita bicara *sub sequent event nih*, terima kasih Pimpinan.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Baik kami lanjutkan Pimpinan.

Jadi memang di dalam *roadmap* dari Pemerintah adalah kita ingin memastikan bahwa Waskita memiliki aset yang setara dengan

kemampuannya, sehingga kita mendorong Waskita melakukan divestasi untuk juga mengurangi kewajibannya. Terkait dengan pertanyaan atau catatan mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, memang itu Pak Agus itu memang cara kita untuk TMN Pak, jadi karena Waskita sudah Tbk maka PMN kita adalah melalui hak memesan efek terlebih dahulu. Mengenai *timing* memang Pemerintah melihat bahwa karena ini merupakan bagian daripada *stream* penyehatan di mana Tahun 2021 sudah dilakukan PMN 7,9 dan kita juga sudah merencanakan untuk melakukan PMN di 2022. Kami berpendapat bahwa usaha terkait dengan penyehatan ini terus dilakukan dan kiranya PMN yang 3 triliun kita dapat bisa lanjutkan.

Terkait dengan prospek yang 0,9 triliun, nanti kami minta Waskita untuk menyampaikan kepada Bapak/Ibu yang terhormat, *view* mereka terkait dengan *appetite* dari *market* di dalam pemenuhan yang 0,9 triliun. Jadi mungkin itu dari kami, tapi nanti kami sampaikan apa yang sudah dilakukan di dalam 8 *stream* penyehatan tersebut, demikian Pimpinan.

Kami kalau boleh Waskita silakan.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Pimpinan. Pimpinan mohon izin Pimpinan.

Sebetulnya begini Pak Rio, ini yang perlu kita klarifikasi. Kita akan bermitra dengan Dirjen Kekayaan Negara. Sebetulnya yang kita inginkan adalah *assesment* dari tempatnya Pak Rio bahwa ini dengan kondisi segala macam ini, *risk appetite*-nya masih ada atau *enggak* ? sehingga tadi pertanyaannya apakah kita mau melanjutkan yang tadi publik itu atau *ya* kita langsung kalau misalnya mau alternatif pendanaan yang lain, biaya yang lain itu apa? kita lebih baik bicara langsung seperti itu karena sebetulnya, ini adalah tentunya sudah dilakukan kajian di tempatnya Pak Rio, jadi jangan kemudian seakan-akan kemudian dilempar lagi kepada Waskita, *enggak*. Kita *kan* bukan bermitra dengan Waskita Karya.

Terima kasih Pimpinan.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Terima kasih Pak Andreas.

Tidak ada maksud kami untuk menyerahkan kepada Waskita. Kalau dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah DJKN berpendapat bahwa PMN ini wajib untuk kita teruskan karena Pemerintah adalah pemegang saham pengendali. Jadi kita harus menunjukkan kepada publik bahwa kita memiliki kepercayaan terhadap BUMN kita.

Demikian dari kami Pimpinan, terima kasih.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Artinya begini, Pimpinan mohon izin.

Kalau tidak terserap oleh publik, sisanya diambil oleh Pemerintah.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Tidak Pak, kita pagu kita adalah 3 triliun. Jadi tidak akan melebihi dari 3 triliun, demikian Bapak.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Demikian porsi Pemerintah *kan* nambah.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Tergantung.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Porsi publiknya karena turun,

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Di dalam hal 0,9 tidak ada yang *subscribe*, tentu akan bertambah, demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Mau menjelaskan atau cukup ?

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA :

Tambahan sedikit.

KETUA RAPAT :

Kita ambil kesimpulan.

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA:

Siap.

Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan penyampaian Pak Dirjen tadi adalah bahwa PMN 3 triliun ini hanya kami gunakan untuk menyelesaikan ruas Tol Palembang-Betung kemudian sebesar 2 triliun dan kemudian Ciawi-Bogor, Bogor-Ciawi-Sukabumi sebesar 996 tadi, jadi ini sudah dipastikan bahwa PMN itu tidak kami gunakan untuk proyek-proyek yang lain, agar ruas tol yang ada ini bisa selesai di tahun depan.

Nah, kemudian menambahkan lagi terkait dengan *right issue* jadi karena Waskita ini ada saham publik bila *right issue* tidak terserap yang kurang lebih nilainya harapan kami adalah 900 tadi, maka saham Pemerintah akan naik dari 75,24 tadi menjadi 79 kurang lebih, sehingga saham publik *terdilusi* dan turun menjadi 20%. Kemudian sedikit menyinggung masalah WSBP dan anak-anak, bahwa PMN ini tidak kami gunakan untuk SHL dan kemudian permasalahan di anak juga tidak menyentuh induk, jadi tidak ada *cross default* dan proses WSBP ini berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP atas permintaan Kementerian BUMN, sehingga proses yang terjadi di WSBP ini merupakan proses hasil audit BPKP.

Kemudian terkait dengan bagaimana strateginya, terkait dengan *right issue*, kami telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para analis, *media gathering*, terus kemudian memberikan ekspose yang positif, pemberitaan yang positif tentang Waskita. Terakhir, bahwa selain perusahaan swasta atau asing yang mengakuisisi ruas-ruas tol tersebut. INA dan SMI juga telah melakukannya sehingga tidak semuanya dan harapan kami memang nantinya yang masih ada ini INA dan SMI berperan kembali untuk *strategic partnership* dengan Waskita.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih.

F – P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM.) :

Interupsi Pimpinan.

Pak Fathan, Gus Irawan, Pak.

Iya langsung saja tadi pertanyaannya Pak, rasanya *sih* situasi sekarang *nggak* akan terpenuhi *lah* 900 miliar publik Pak, tapi *kan* sudah dihitung dari awal kita butuh 3,9 triliun *ya*, Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali tambah 3 triliun, 900 publik *kan* begitu ? tapi kelihatannya saya *enggak* begitu yakin itu terpenuhi. *Nah*, pertanyaannya spesifik belum terjawab tadi Pak Dirut, 900 ditutup dari mana lagi Pak begitu *loh* ? tahu *lah* kita kalau itu *enggak* dari publik *ya terdilusi* sama publik, tapi dananya *kan* masih tetap harus dipenuhi guna tadi menyelesaikan 2 ruas tol itu dan penyehatan yang disampaikan Pak Dirjen begitu Pak. Dari mana 900 miliar lagi *tuh* ?

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA :

Izin Pimpinan.

Jadi untuk penyelesaian ruas tol, ini hanya kami, hitungan kami untuk menyelesaikan itu hanya dari PMN Tahun 2021 sebesar 7,9 dan Tahun 2022 sebesar 3 triliun. Dana *right issue* yang kami terima ini kami gunakan untuk penyelesaian modal kerja, sehingga kami tidak memerlukan pinjaman lagi dari bank kalau kami mendapatkan *right issue*. Seandainya nanti tidak kami

dapatkan yang 900, artinya kami harus datang lagi ke bank untuk melakukan pinjaman. Yang ini akan menjadi tambahan karena kami harus menanggung beban bunga.

KETUA RAPAT :

Sudah terjawab.

ANGGOTA KOMISI XI :

Demikian Pak.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Sebaiknya disiapkan jawaban secara tuntas, karena kalau Bapak menambah beban bunga, pertanyaannya bagaimana dengan program restrukturisasi yang sudah disetujui ? *kan* Bapak terikat dengan *agreement restructuring*-nya itu. Jadi sebaiknya memang kalau belum siap, lebih baik disiapkan saja pertanyaan secara komprehensif daripada kita sepotong-sepotong loh, iya ? kita paham sekali masalah ini, *kan* itu tentu *right issue* ini adalah bagian dari Pak Rio, tentu dari *Master Of Restructuring Agreement (MRA)* daripada kita buka-buka lebih baik secara komprehensif *lah*, sehingga itu kemudian itu jelas karena kalau tidak nanti akan berdampak kepada yang lainnya dan yang kedua yang belum terjawab tadi sebagai bagian dari keterbukaan publik tadi, mengenai *restatement*.

KETUA RAPAT :

Kasih catatan saja nanti kita.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Iya karena kalau dengan demikian, ini yang menjadi, *enggak* nanti menjadi *governance* di kita *nih*. Artinya persetujuan waktu itu kita lakukan masih menggunakan Laporan Keuangan yang lama, sebelum *restatement*. *Nah* apakah ini harus disampaikan kembali ? ini untuk, untuk tata kelolanya saja karena semua *kan* harus berdasarkan pengambilan keputusan pada saat itu berdasarkan data yang ada pada kami pada saat itu. Ini perlu kita jaga bersama-sama *nih governance*-nya Pak Rio, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :

Sedikit Pak Fathan.

Pak *kan* ini *kan* masih berjalan *kan* proses *right issue*-nya.

KETUA RAPAT :

Belum *loh*.

WAKIL KETUA KOMISI XI/ F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P) :

Belum disetujui.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :

Iya begini *loh* maksudnya, itu proses ini sedang berjalan, iya *kan* sedang berjalan untuk menuju ke *right issue*. Nah Bapak perkirakan, Bapak *kan* tadi sudah menyampaikan bahwa sudah *media gathering*, *gathering* juga dengan para konsultan keuangan dan sebagainya. Apakah ada minat publik untuk itu Pak mengambil porsi itu ? porsi itu. *Lah kan* skenarionya kalau itu tidak diambil ke publik dengan situasi laporan keuangan seperti ini Pak dan tidak dari *restatement* seperti yang disampaikan oleh Pak Andreas dan sebagainya.

Restatement-nya sudah ada ? Nah kalau sudah ada *restatement* seperti itu, *nah* apa saya ingin tahu Pak sedikit interaktif, apa pandangan para konsultan keuangan yang disampaikan ke Bapak ? apakah ada minat mereka untuk mengambil Pak ?

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA :

Izin Pimpinan.

Jadi berdasarkan *mapping* kami di *market*, iya masih adalah cukup banyak peminat terhadap saham Waskita.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :

Masih banyak ?

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA :

Iya karena melihat bahwa nilai yang ada saat ini itu, iya masih dianggap rendah. Dengan penyehatan Waskita ini mereka berharap memang Waskita ke depan akan menjadi lebih baik dan tren kinerja keuangan Waskita yang

semakin membaik ini juga menjadi dasar para investor untuk nanti mengambil saham.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :

Dengan pendapatan yang makin menurun begini Pak ?

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA :

Pendapatan menurun Pak tapi tren labanya yang, yang meningkat ini yang menjadi catatan Pak, demikian Pak Misbakhun.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :

Terus kemudian Bapak punya rencana *ya* kalau itu *kan* akan diambil. Berarti *kan* Pemerintah *right issue* ini *kan* tidak diambil oleh Pemerintah, *iya kan* ? *Right issue*-nya maksud saya porsi yang diambil oleh publik akan diambil oleh publik berarti *kan* ? Pemerintah cukup menambahkan 3 triliun 900 miliarnya diambil oleh publik dan status kepemilikan saham seperti sekarang saat ini, itu ? *Lah* kalau ini yang terjadi Pak, kapan batas waktunya ? *nah*, kesepakatan ini kapan batas waktunya, sehingga apa *ya* jalan tol di Kayuagung dan tol di Bogor ini *kan* bisa diselesaikan dan masyarakat bisa merasakan Pak, itu saja.

KETUA RAPAT :

Oke baik, saya kira bagus tadi catatan Pak Misbakhun dan Pak Dirjen tadi juga sudah meyakinkan kita dan Pak Dirut, memang pasar Waskita masih, masih ada harapan tumbuh *lah*, begitu *ya* ? *Iya, iya, iya.*

Baik, *ya* saham Pemerintah *enggak diurusilah, nggak* berkurang. Baik sekarang kita masuk Kesimpulan, silakan.

F – PDI PERJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.) :

Enggak, izin Ketua. Saya sebentar saja.

Perkenalkan yang ini yang pertanyaan saya sebelumnya waktu kita rapat sebelumnya Pak Dirjen karena seharusnya ini *kan* semua di Bapak sebagai Dirjen Kekayaan Negara, mana persetujuan kita Bulan Desember *ya*, kemudian muncul persoalan di Bulan Maret dan sampai sekarang. *Nah* itu bagaimana kajian dari DJKN untuk memberikan meneruskan ini kembali begitu *loh*, itu yang saya maksud. Tadi yang disampaikan Pak Andreas kita urusan di Komisi XI ini sama Pak Dirjen Pak bukan di BUMN. Bapak yang memberikan persetujuan, apa ? Bapak yang membawa usulan dari BUMN ke Komisi XI untuk dimintakan persetujuan. *Nah* semuanya *kan* filternya ada di Bapak, karena ini *enggak, enggak* ada mempersoalkan di BUMN-nya. *Nah* itu yang maksud saya ketika Komisi XI itu meskipun sudah ada persetujuan, tapi kalau mau di seiring perkembangan *kan* bisa ditinjau kembali, seperti itu Pak terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih catatan-catatan dari teman-teman, jadi menjadi perhatian Pak Dirjen dan Pak Dirut untuk penyehatan Waskita dan juga kinerja yang lebih baik.

Oke Pak Dolfie nambahin.

WAKIL KETUA KOMISI XI/ F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P) :

Ini supaya memberi keyakinan kepada kita semua *nih* supaya jangan ragu-ragu bahwa betul ada kasus tadi disampaikan Pak Andreas, Pak Masinton dan beberapa teman yang mencapai berapa ? 2,5 triliun ? kasus ini *kan* terjadi pada Tahun 2016 hingga 2020. Ketika waktu Bulan Desember, Laporan Keuangan itu *kan* sudah merefleksikan itu. *Nah*, artinya memang sudah terefleksi di dalam laporan keuangan yang Halaman 12 di mana masuk nya nanti bisa ditambahkan penjelasannya, iya itu diserap, karena ini terjadi di *level* anak perusahaan, sehingga ketika dia masuk ke konsolidasi, tentu ada yang diserap, ada yang tidak yang kemudian restrukturasi terjadi di anak perusahaan. *Nah*, intinya waktu menyampaikan laporan keuangan ini waktu Bulan Desember 2021 keadaan itu sudah diserap di dalam laporan keuangannya, *nah* itu yang,

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Penegasan karena setelah itu, setelah pernyataan dari Pihak Kejaksaan Agung yang menjadi informasi publik dilakukan *restatement* *enggak* terhadap laporan keuangan ? itu penting *tuh*.

Enggak, enggak ini, ini penting supaya tadi karena dari Pak Rio katanya ada. Iya makanya saya mengatakan kalau ada, terus seperti apa begitu *loh* ? itu, itu sangat penting. Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT. WASKITA KARYA :

Izin Pimpinan, izin.

Jadi setelah kejadian itu memang belum, tidak ada *restatement* Pak, *restatement* itu terjadi pada Tahun 2021 Pak dan itu juga dilakukan berdasarkan beberapa temuan BPK, kemudian adanya penyesuaian beberapa beban pada tahun yang berakhir Tahun 2020 dan 2009 yang belum dicatat, kemudian juga penyesuaian terhadap nilai realisasi netto atas persediaan pada *project-project* yang, yang, yang *prestige*. Demikian Pak.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Pimpinan.

Artinya Bapak tolong tegaskan, laporan keuangan yang waktu itu disampaikan kepada kita, itu sudah berarti sudah merupakan laporan

keuangan *restatement*, iya tapi pada saat penyampaian itu tidak disampaikan kepada kita bahwa ada masalah ini.

WAKIL KETUA KOMISI XI/ F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P) :

Enggak ada yang bertanya.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Ini catatan saja, *enggak* apa-apa bagi kita bahwa itu adalah laporan yang disampaikan adalah laporan keuangan yang sudah melalui *restatement*, iya karena adanya kerugian itu, yang pada saat itu tidak disampaikan, begitu saja.

WAKIL KETUA KOMISI XI/ F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P) :

Begini, setiap kita memberikan PMN, kita tidak pernah menanyakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di anak perusahaan, iya *kan* ? ini *kan* terjadinya di anak perusahaan dan laporan keuangan yang 2021 itu tadi sudah menyerap kondisi itu. Ini supaya jangan jadi preseden kita PMN yang sudah kita berikan, sudah dijalankan prosesnya kemudian kita permasalahan dan menimbulkan kredibilitas di pasar sendiri menjadi bimbang. *Nah* itu yang kita jaga ini, kita jaga sama-sama, maksud saya. Jangan sampai yang kita masalahkan ini membuat kegoncangan, ketidakpercayaan, padahal niat baiknya *kan* tadi sudah jelas, itu.

Jadi menurut saya Pak Andreas, karena tadi sudah disebutkan bahwa laporan keuangan di Tahun 2021 yang disampaikan kepada kita itu sudah menyerap kondisi itu dan sudah *restatement* juga sebenarnya. Kalau persoalannya kita apa tidak terungkap masalahnya, karena waktu itu mungkin kita tidak tahu masalahnya, kita tidak memberi atensi terhadap masalahnya. Karena kalau semua ini seperti itu pola kita menyetujui PMN, bisa-bisa semua PMN yang sudah berjalan bisa kita batalkan karena kita mendapat informasi belakangan bahwa ada anak perusahaannya yang *garong* di situ. *Nah*, ini maksud saya, maksud kita semua kita jaga *nih* proses yang sudah berjalan ini, itu kita jaga Pak Andreas supaya tidak menimbulkan malah kita malah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap apa yang sudah dijalankan, padahal penindakan hukum sudah dijalankan dan apa yang perlu dilakukan secara hukum sudah dilakukan. *Nah*, ini yang perlu kita jaga bersama, itu saja.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Kita dalam semangat yang sama Pak Dolfie untuk menjaga kepercayaan publik, ini adalah bagian dari menjaga kepercayaan publik. Karena kenapa ? pada saat kita rapat di Bulan Desember kemarin, itu belum muncul informasi publik dari Kejaksaan Agung. Menjadi kewajiban perusahaan publik, ketika ini ada informasi publik, maka dilakukan yang disebut dengan keterbukaan informasi. Ini, ini wajib hukumnya itu ada di dalam pasar modal, ini yang saya sama maksudkan begitu. Jadi ini supaya alurnya jelas karena pada saat kita menyetujui dan pada saat itu manajemen tidak menyampaikan

ini bahwa terjadi. Walau itu kita mengatakan ini problemnya ada di anak perusahaan tapi bahwa kemudian itu sudah dilakukan *restatement*, Bulan Juli kemudian ada pengumuman dari Kejaksaan Agung, justru *sub sequent event* inilah yang merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik, sehingga dengan demikian kalau memang laporan keuangan sudah memasukkan itu, iya ini menjadi bagian *aja* dari catatan di dalam pertemuan ini, sehingga keterbukaan informasi publik ini betul-betul sesuai dengan juga yang ada di dalam pasar modal.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

F – P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik. terima kasih. cukup *ya* ? cukup *ya* ?

F – P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM.):

Ini hanya memperkuat saja, sebetulnya dengan pembahasan kita ini, ini sekaligus saya kira jawabannya sudah dapat tadi. Tidak bermaksud seperti maksud Pak Dolfie bukan mau, ini *kan* sesuatu yang disetujui, tapi ada kejadian oleh pihak Kejaksaan umumkan, lalu kita bahas di sini jawabannya sudah jelas itu sudah terakomodir. Ini justru memberikan kepercayaan kepada publik, bukan sebaliknya begitu *loh* Pak, saya kira.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Jadi apa namanya penajaman bagi Dirjen dan juga Pak Dirut.

Silakan Sekretariat Rancangan Kesimpulan.

**Rancangan Kesimpulan
Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Dirjen Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan dan Direktur Utama Waskita Karya.
Rencana Proses Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara melalui
Mekanisme *Right Issue* kepada PT Waskita Karya Tahun 2022
Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2022-2023**

Komisi XI DPR RI bersama Dirjen dan Direktur Waskita Karya menyetujui hal sebagai berikut :

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh Penjelasan dari PT Waskita Karya tentang program privatisasi melalui mekanisme *right issue* Tahun 2022.
2. Komisi XI DPR RI menyetujui proses privatisasi dan penyertaan modal negara melalui mekanisme *right issue* kepada PT Waskita Karya Tahun

2022 dengan PMN sebesar 3 triliun dan *right issue* porsi publik sebesar Rp 900 miliar dengan struktur kepemilikan saham Pemerintah tetap sebesar 75,35% dan kepemilikan saham publik sebesar 24,65%.

3. *Right issue* PT Waskita Karya telah diarahkan untuk memperkuat ekuitas PT Waskita Karya untuk dan untuk meningkatkan kinerja operasional.
4. PT Waskita Karya melanjutkan upaya penyehatan keuangan melalui strategi 8 *stream* dan strategi lainnya agar dikelola untuk dapat mempercepat peningkatan kinerja keuangan PT Waskita Karya yang diperlihatkan dengan perbaikan rasio keuangan, total arus kas dari aktivitas operasi positif, pendapatan usaha kembali ke kapasitas normal, dan laba bersih positif.
5. Kementerian Keuangan memperkuat kebijakan dan regulasi atas kekayaan negara yang dipisahkan, yang pengelolaannya diserahkan kepada perseroan untuk diwajibkan memenuhi syarat ketentuan dan *key performance* indikator tertentu antara lain pengolahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* memiliki manajemen risiko, bisnis proses yang profesional, dan pembentukan anak perseroan dengan syarat ketentuan dan KPU tertentu.
6. PT Waskita Karya agar menyampaikan *roadmap* dari restrukturisasi bisnis dan *refocusing* bisnis dalam rangka peningkatan efisiensi.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Yes.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Pimpinan, yang Poin 6 itu sebetulnya menjadi kesimpulan rapat sebelumnya, tapi belum disampaikan, begitu ? jadi jangan seakan-akan ini baru menjadi apa,

KETUA RAPAT :

Enam sudah jadi kesimpulan sebelumnya, jadi dihapus saja ya ?

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Eggak kata-katanya bahwa begitu loh, PT Waskita Karya agar menyampaikan,

KETUA RAPAT :

Roadmap.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Di sini PT Waskita Karya atau sebenarnya Kementerian Keuangan ya ?
Kita mintanya ke Dirjen Kekayaan Negara.

KETUA RAPAT :

DJKN saja ya ?

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Agar menyampaikan *roadmap* dari yang telah menjadi keputusan rapat.

KETUA RAPAT :

Sebelumnya.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Iya, tanggal berapa begitu begitu, kira-kira begitu.

KETUA RAPAT :

Coba diurut dari atas.

Pak Andreas sudah setuju semua ? Nomor 1, sudah *oke*. Nomor 2 ?

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Ketua, iya Nomor 3, mungkin.

KETUA RAPAT :

Nomor 3 mungkin PT Waskita Karya memastikan.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Yang di Nomor 2 itu pada saat persetujuan itu catatan bahwa sesuai penjelasan pada rapat, sesuai penjelasan bahwa laporan keuangan yang disampaikan pada persetujuan rapat tanggal ini sudah memasukkan kerugian terhadap anak perusahaan PT Waskita yang, yang kasusnya muncul pada bulan ini, kira-kira demikianlah.

Iya, Nomor 3 *oke* ?

KETUA RAPAT :

Cukup Nomor 3 itu ya, prinsip Keterbukaan Informasi Publik, iya betul Pak Andreas ya ?

Cukup Nomor 3.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Tapi mungkin perlu di lebih diperjelas ya, bagaimana Bu, kalau menurut saya supaya lebih *clear* saja.

F – PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.) :

Itu *kan* Nomor 2 menyetujui saja, kemudian Nomor 3 itu tentang informasi publik tapi yang dimaksud adalah yang dimaksud Andreas tadi, bahwa persetujuan itu dengan catatan begitu *loh* Pak. Jadi kita memberikan catatan begitu. Jadi persetujuan memang sudah, tetapi dengan perkembangan yang ada, kita memberikan catatan begitu, *kan enggak* apa-apa, justru untuk memberitahu publik bahwa Komisi XI bereaksi atas catatan itu dan ini mudah-mudahan publik jadi alih-alih kepercayaan kepada Waskita *oke*, tapi kepada kitanya begitu *loh*. Jadi dengan adanya kasus ini apa kita tidak bereaksi apa-apa *kan* begitu maksudnya. Jadi di sini menyetujui iya, tapi catatannya tetap ditulis begitu.

WAKIL KETUA KOMISI XI/ F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P) :

Tadi *kan* sudah dijelaskan bahwa laporan keuangan yang disampaikan pada saat meminta persetujuan 2021, kasus itu sudah diserap di dalam laporan keuangan tersebut, bahwa kita tidak memberikan atensi karena kita tidak dapat informasi apa yang terjadi pada anak ataupun cucu. *Nah*, itu *kan* sudah terserap, tetapi fakta realitas itu sudah terserap dalam keuangan itu. Yang menjadi atensi dari Pak Andreas tadi adalah bahwa laporan keuangan yang sudah terserap itu, itu bagian dari keterbukaan informasi publik yang istilahnya pakai *restatement* itu. *Nah*, oleh karena itulah yang Nomor 3 itu kita *jadiin* jaminan bahwa dalam proses, *kan* ini proses *right issue nih* dari Desember sampai sekarang *right issue* bahwa prinsip keterbukaan publiknya itu sudah terpenuhi, itu *aja* yang jadi ke jaminan kita. Apa itu ? iya yang termasuk risiko-risiko yang diakibatkan oleh anak dan cucu itu, itu maksud saya.

Cukuplah di Nomor 3 itu karena kalau tidak nanti membingungkan kita ke sananya.

KETUA RAPAT :

Saya setuju, iya Nomor 3 .

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Oke selama pengertiannya seperti itu, kita sepakati semua, *oke* kita setuju.

KETUA RAPAT :

Iya, iya itu sudah termaktub dalam prinsip keterbukaan publik Bu Anis.

Baik. 2, 3, 4 *right issue* PT Waskita Karya diarahkan untuk memperkuat ekuitas dan untuk meningkatkan kinerja operasional dan untuklah itu. Jangan Waskita kita lagi diulang, *enggak* enak bahasanya itu.

5. PT Waskita Karya upaya penyatuan keuangan.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):

Yang Nomor 4 itu tolong juga dimasukkan karena kaitannya penting juga di dalam apa mengimplementasikan program 8 *stream* penyehatan, karena *kan* ini sebagai bagian dari situ.

KETUA RAPAT:

5 *kan* ada itu.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

5, *oh* kalau 4, 5 digabung bagaimana ?

KETUA RAPAT :

Iya betul juga *sih*.

WAKIL KETUA KOMISI XI/ F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P) :

Right issue-nya *kan* untuk itu.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Enggak, *nggak* ada hubungannya dengan Poin 5, begitu *loh*.

Satu *ya* ? Itu *kan* sebetulnya restrukturisasi.

KETUA RAPAT :

Kinerja keuangan.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Dua, PMN termasuk *right issue*.

KETUA RAPAT :

Iya, iya.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Kan begitu rangkaiannya *tuh*, begitu *loh*.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Menurut pendapat kami memang lebih baik dipisah, karena yang 4 memberikan penekanan pada proses, yang karena itulah Waskita dan kami datang ke sini Pak.

KETUA RAPAT :

Oke, oke.

4. Khusus *right issue* PT Waskita Karya diarahkan untuk memperkuat, untuk meningkatkan kinerja operasional.
5. PT Waskita Karya menentukan upaya penyehatan keuangan melalui strategi 8 *stream* dan strategi lainnya agar dikelola untuk dapat mempercepat peningkatan kinerja keuangan yang diperlihatkan dengan perbaikan rasio keuangan, total arus kas dari aktivitas operasi positif, pendapatan usaha kembali ke kapasitas normal, dan laba bersih positif.
6. Kementerian Keuangan saya kira normatif ya ? Manajemen risiko, bisnis yang profesional dan pembentukan anak perusahaan dengan syarat dan tertentu.
7. Kementerian Keuangan agar menyampaikan *roadmap* dari investasi bisnis dan *refocusing* bisnis dalam rangka peningkatan efisiensi berdasarkan keputusan Rapat Kerja Komisi XI pada 15 Desember 2021.
8. Direktur Utama PT Waskita Karya akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan anggota 7 hari kerja.

Baik cukup kesimpulan ? Pak Andreas ?

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) :

Cukup.

KETUA RAPAT :

Baik, cukup ? kita sepakati, Pemerintah ? Pak Dirut cukup ?

Baik, kita sepakati ? Pak Dirut ? cukup ?

Baik, kita sepakati.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Rapat Kerja pada sore hari ini telah berakhir sebelum saya tutup, silakan Pak Dirjen untuk memberikan *closing statement*.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI :

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Terima kasih atas dukungannya terhadap rencana PMN melalui *right issue* yang akan dilakukan oleh Waskita Karya. Kita berharap bahwa pelaksanaan *right issue*-nya dapat berjalan dengan lancar dan publik dapat bersama-sama dengan Pemerintah menyerap rencana daripada *right issue*, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik Pak Dirjen, Pak Dirut terima kasih dan kita akhiri dengan,

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.19 WIB).

Jakarta, 12 September 2022

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd

Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.
NIP. 197106131998032003